BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PETA JALAN KABUPATEN LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Lampung Barat Hebat dan Sejahtera, Pemerintah Daerah telah mencanangkan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Literasi;

b. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan Kabupaten Literasi perlu disusun Peta Jalan Kabupaten Literasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Kabupaten Literasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN KABUPATEN LITERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peta Jalan adalah dokumen pemandu dan perencanaan untuk melaksanakan strategi yang memetakan apa saja visi dan arah kebijakan dari waktu ke waktu.
6. Gerakan Literasi Daerah yang selanjutnya disingkat GLD adalah sebuah gerakan untuk menyinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan membudayakan literasi di Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 2

Peta Jalan Kabupaten Literasi merupakan dokumen acuan bagi Pemerintah Daerah, OPD terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Kabupaten Literasi.

Pasal 3

Peta Jalan Kabupaten Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra OPD dan Rencana Tahunan GLD.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peta Jalan Kabupaten Literasi yaitu :
a. mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Literasi antar OPD dan GLD serta pihak terkait lain;
b. sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022 berdasarkan tugas dan fungsi OPD; dan
c. menetapkan rencana aksi Kabupaten Literasi.

OPD | KABAG HUKUM

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Sistematika Peta Jalan Kabupaten Literasi sebagai berikut :
   a. BAB I : Menyiapkan diri sebagai kabupaten literasi;
   b. BAB II : Penguatan literasi;
   c. BAB III : Arah kebijakan pelaksanaan kabupaten literasi
   d. BAB IV : Pencapaian dan pelaksanaan strategis kabupaten literasi;
   e. BAB V : Manajemen pelaksanaan kabupaten literasi;
   f. BAB VI : Penutup

(2) Uraian lebih lanjut Peta Jalan Kabupaten Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Maret 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 21 maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 24

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Balitbang	
5	D. Pendidikan	
6	D. Perpustakaan	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

MENUJU
LAMPUNG BARAT
HEBAT!



PETA JALAN
KABUPATEN LITERASI





Badan Penelitian dan Pengembangan

MENUJU
LAMPUNG BARAT
HEBAT!

PETA JALAN

KABUPATEN LITERASI



TIM PENYUSUN PETA JALAN

Penasehat : 1. Parosil Mabsus, S.Pd., Bupati Lampung Barat
2. Drs. Mad Hasnurin, Wakil Bupati Lampung Barat

Pengarah : 1. Ir. Sudarto, MM., Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
2. Tri Umaryani, SP., M.Si, Kepala Balitbang

Kontributor:

1. Ir. Okmal, M.Si., Kepala Bappeda
2. Bulki Basri, S.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Drs. Saripan Halim, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4. Drs. Yuda Setiawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Pekon
5. Asep Suganda, S.Pd., MM, Sekretaris Balitbang
6. Sri Mulyani, SH, Kepala Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Kerjasama, Balitbang
7. Farida Sormin, S.IP., M.Si, Kepala Sub Bidang Sosbud, Kemasyarakatan dan Pemerintah, Balitbang
8. Tim Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Lampung Barat
9. Ayi Ahadiat, SE., MBA, Tenaga Ahli Kelitbangan
10. Yusdiyanto, SH., MH, Tenaga Ahli Kelitbangan
11. Donna Sorenty Moza, SE, Tenaga Ahli Kelitbangan

Sekretariat Kabupaten Literasi
Kabupaten Lampung Barat
Badan Penelitian dan Pengembangan
Jalan Teratai Nomor 3 Way Mengaku, Liwa 34811

OPD | KABAG HUKUM

SAMBUTAN BUPATI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Untuk itu kebijakan peningkatan kualitas SDM harus menjadi prioritas. Selanjutnya bila dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung Barat tahun 2017 mencapai 66,06 atau menduduki urutan ke-9 di Provinsi Lampung. Dimana bila dilihat dari komponen-komponen pendukung IPM-nya maka komponen pengetahuan masih cukup rendah yaitu mencapai 7,33 atau menduduki peringkat 11 dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Menyadari kondisi tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mencanangkan diri sebagai Kabupaten Literasi sejak tanggal 2 Mei 2018. Langkah ini menjadi kebijakan strategis dan merupakan komitmen daerah dalam rangka mengembangkan SDM yang berkualitas, memiliki kompetensi dan kemampuan berinovasi dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan potensi alam yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan kualitas hidupnya dan siap bersaing dalam sektor lain di era milenial ini.

Sebagai sebuah kebijakan yang strategis maka pelaksanaan Kabupaten Literasi membutuhkan dukungan pemikiran agar pelaksanaan Kabupaten Literasi kedepannya dapat optimal. Oleh karena itu Bapak Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Tim Koordinasi Kabupaten Literasi serta partisipasi semua pihak karena telah berhasil menyusun sebuah dokumen panduan pencapaian Kabupaten Literasi yang berjudul Peta Jalan Kabupaten Literasi.

OPD | KABAG HUKUM

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan visi Lampung Barat Hebat dan Sejahtera, Bupati Lampung Barat secara resmi telah mencanangkan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Literasi. Pencanangan tersebut dilakukan bertepatan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, Rabu, 02 Mei 2018 di Gedung Olahraga (GOR) Aji Saka, Kawasan Sekuting Terpadu, Kecamatan Balik Bukit. Acara dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti, Deputi IV Kantor Kepresidenan Haryani Jalal, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Lampung Herlina Warganegara, Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin, unsur Forkompinda serta kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Dengan mencanangkan diri sebagai Kabupaten Literasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat Lampung Barat melalui peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan karena implementasi literasi dalam konteks ini yang akan ditingkatkan bukan hanya masalah bagaimana bebas dari buta aksara, melainkan juga bagaimana warga memiliki kecakapan hidup agar mampu meningkatkan daya saing melalui penguatan ekosistem untuk membentuk insan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong.

Selanjutnya Kabupaten Literasi telah menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah yang perlu dibuat *grand design* operasionalisasinya sehingga menjadi kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan dan bernilai produktif yaitu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun buku Peta Jalan Kabupaten Literasi yang merupakan buku acuan atau tuntunan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat maupun pegiat literasi Lampung Barat yang ada dalam

OPD | KABAG HUKUM

melaksanakan Kabupaten Literasi kedepan. Peta jalan ini disusun berdasarkan kontribusi dari banyak pihak. Namun demikian kami menyadari bahwa dalam penyajiannya masih memerlukan masukan serta saran yang bersifat membangun demi terwujudnya peta jalan yang ideal. Selanjutnya peta jalan ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan kebijakan literasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Akhirnya, mudah-mudahan buku Peta Jalan Kabupaten Literasi ini dapat menjadi pedoman bersama dan membantu dalam menjalankan kegiatan-kegiatan literasi di Kabupaten Lampung Barat sehingga "Literasi untuk Kesejahteraan Rakyat" dapat terwujud. Semoga Allah SWT, Tuhan YME senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua dalam mewujudkan Kabupaten Lampung Barat yang Hebat dan Sejahtera.

Liwa, 2019

Ketua Tim Koordinasi Kabupaten Literasi

Kabupaten Lampung Barat

Ir. SUDARTO, MM.

OPD | KABAG HUKUM

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN PETA JALAN i
SAMBUTAN BUPATI ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR LAMPIRAN vii
BAB I MENYIAPKAN DIRI SEBAGAI KABUPATEN LITERASI
1.1. Profil Kabupaten Lampung Barat 1
1.2. Visi dan Misi 5
1.3. Tantangan Permasalahan Literasi dan Peluang Masa Depan 6

BAB 2 PENGUATAN LITERASI
2.1. Pentingnya Literasi 14
2.2. Dampak Literasi Rendah 16
2.3. Literasi Sebagai Gerakan Nasional 17
2.4. Prisip Gerakan Literasi 21
2.5. Dimensi Literasi 21
2.6. Ranah Literasi 23
Gerakan Literasi Sekolah 23
Gerakan Literasi Keluarga 33
Gerakan Literasi Masyarakat 40
2.7. Dasar Hukum 49

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN KABUPATEN LITERASI
3.1. Arah Kebijakan Pelaksanaan Kabupaten Literasi 51
3.1.1. Isu Strategis RPJMD 2017-2022 51
3.1.2. Arah Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 52
3.1.3. Pengintegrasian Kabupaten Literasi dalam RPJMD 55
3.2. Rencana Aksi Kabupaten Literasi 57
3.3. Ukuran Keberhasilan Kabupaten Literasi 63
3.4. Arca Perubahan Kabupaten Literasi 65

BAB 4 PENCAPAIAN DAN PELAKSANAAN STRATEGIS KABUPATEN LITERASI
4.1. Kemajuan Pelaksanaan Kabupaten Literasi 74

OPD | KABAG HUKUM

4.2. Pelaksanaan Strategis Kabupaten Literasi 77
Meningkatkan Kapasitas Fasilitator..... 78
Meningkatkan Jumlah dan Ragam Sumber Belajar Bermutu..... 81
Perluasan Akses Sumber Belajar Bermutu dan Cakupan Peserta Belajar 83
Meningkatkan Pelibatan Publik 86
Penguatan Tata Kelola..... 88

BAB 5 MANAJEMEN PELAKSANAAN KABUPATEN LITERASI
5.1. Pengorganisasian 90
5.2. Monitoring dan Evaluasi 92

BAB 6 PENUTUP 109

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

OPD | KABAG HUKUM

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan per Kecamatan Tahun 2016..... 2
Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Rencana Aksi dan OPD Penanggung Jawab..... 59
Tabel 3.2 Indikator Keberhasilan Kabupaten Literasi Per Ranah Literasi 63
Tabel 3.3 Area Perubahan Kabupaten Literasi 2019-2022..... 59
Tabel 4.1 Pelaksanaan Kabupaten Literasi Tahun 2018 (satu Tahun Pencapaian Kabupaten Literasi)..... 75
Tabel 5.1 Penilaian dan Indikator Keberhasilan Gerakan Literasi Sekolah 98
Tabel 5.2 Penilaian dan Indikator Keberhasilan Gerakan Literasi Keluarga 104
Tabel 5.3 Penilaian dan Indikator Keberhasilan Gerakan Literasi Masyarakat 107

OPD | KABAG HUKUM

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Piramida Penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016..... 2

Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013-2016 3

Gambar 1.3 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 4

Gambar 2.1 Peta Gerakan Literasi..... 20

Gambar 3.1 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat..... 53

Gambar 3.2 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung Tahun 2016 53

Gambar 3.3 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012–2016 Kabupaten Lampung Barat 54

Gambar 3.4 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat 55

Gambar 3.5 Tata Kelola Kabupaten Literasi..... 68

OPD | KABAG HUKUM

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/380/KPTS/IV.03/2019 Tentang Tim Koordinasi Kabupaten Literasi
Lampiran 2	Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Gerakan Literasi Daerah
Lampiran 3	Indikator Kabupaten Literasi dan Target Pencapaian per Tahun
Lampiran 4	Rencana Aksi Kabupaten Literasi 2019-2022

OPD | KABAG HUKUM

BAB I

MENYIAPKAN DIRI SEBAGAI KABUPATEN LITERASI

1.1. Profil Kabupaten Lampung Barat

Liwa, ibukota Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3452). Setelah mengalami pemekaran pada tahun 2012 maka luas indikatif wilayah administrasi Lampung Barat yang semula ± 5.050,01 km2 menjadi ± 2.142,78 km2. Kabupaten Lampung Barat meliputi 15 kecamatan, 136 pekon dan 5 kelurahan, dengan jumlah Penduduk pada Tahun 2016 sebesar 295.689 jiwa (157.088 laki – laki dan 138.601 perempuan).

Ditinjau dari tingkat usianya, penduduk Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh penduduk usia muda, yaitu berkisar antara 20 tahun hingga 45 Tahun. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lampung Barat masih timpang atau tidak merata antar wilayah. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kebun Tebu 1.436 jiwa/km^2 sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Batu Brak yaitu 49,75 jiwa/km^2.



OPD | KABAG HUKUM

Gambar 1.1

Piramida Penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017

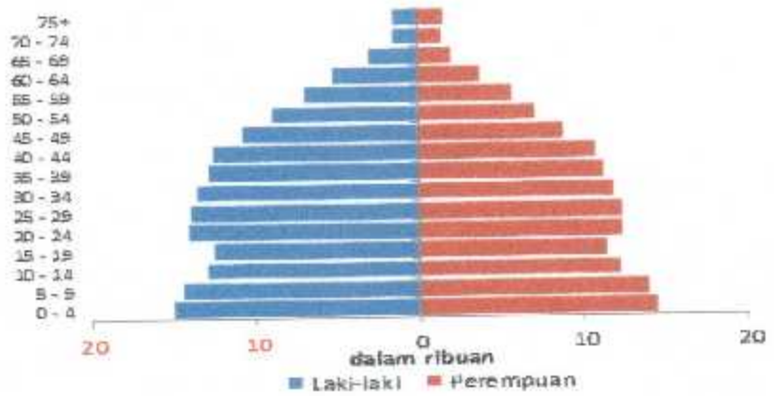

Sumber: BPS Lampung Barat, 2018

Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Balik Bukit yaitu 39.186 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Lumbok Seminung 6.601 jiwa. Secara lengkap jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Per Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (per Km²)
1. Balik Bukit	39,186	228
2. Sukau	21,485	98
3. Lumbok Seminung	6,601	301
4. Belalau	11,964	55
5. Sekincau	18,666	161
6. Suoh	18,115	108
7. Batubrak	12,941	51
8. Pagar Dewa	19,038	177
9. Batu Ketulis	15,161	149
10. Bandar Negeri Suoh	28,178	169
11. Sumber Jaya	24,473	128
12. Way Tenong	32,779	287
13. Gedung Surian	13,976	164
14. Kebun Tebu	22,163	554
15. Air Hitam	13860	186
Lampung Barat	298,286	148

Sumber: BPS Lampung Barat, 2018

OPD | KABAG HUKUM

Ditinjau dari perkembangannya, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu lima Tahun terakhir cenderung menurun. Pada Tahun 2013 yang lalu, penduduk Kabupaten Lampung Barat tumbuh sebesar 1,62 persen, dan terus mengalami perlambatan hingga Tahun 2017 menjadi sebesar 0,87 persen. Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 1.2.

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Lampung Barat, 2018

Jumlah penduduk usia kerja berkaitan erat dengan besarnya jumlah penduduk itu sendiri, karena penduduk usia kerja merupakan bagian dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Hingga tahun 2015 lebih dari 80 persen penduduk usia kerja (+ 15 tahun) di Kabupaten Lampung Barat bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan (122.855 jiwa). Bekerja di sektor industri sebanyak 3.485 jiwa (2,31 persen). Sedangkan yang melakukan pekerjaan disektor jasa sebanyak 24.352 jiwa (16,16 persen).

OPD | KABAG HUKUM

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2012 adalah sebesar 84,20 persen, sebesar 78,38 persen pada tahun 2013, sebesar 74,71 persen pada tahun 2014, dan sebesar 74,06 persen pada tahun 2015. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) pada tahun 2012, terdapat diantaranya 84 orang yang termasuk dalam angkatan kerja dan dari 100 penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), pada tahun 2013 terdapat di antaranya 78 orang yang termasuk dalam angkatan kerja, pada tahun 2014 terdapat 75 orang yang termasuk angkatan kerja. Selanjutnya pada tahun 2015 terdapat 74 orang yang termasuk angkatan kerja.

Gambar 1.3.

Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016

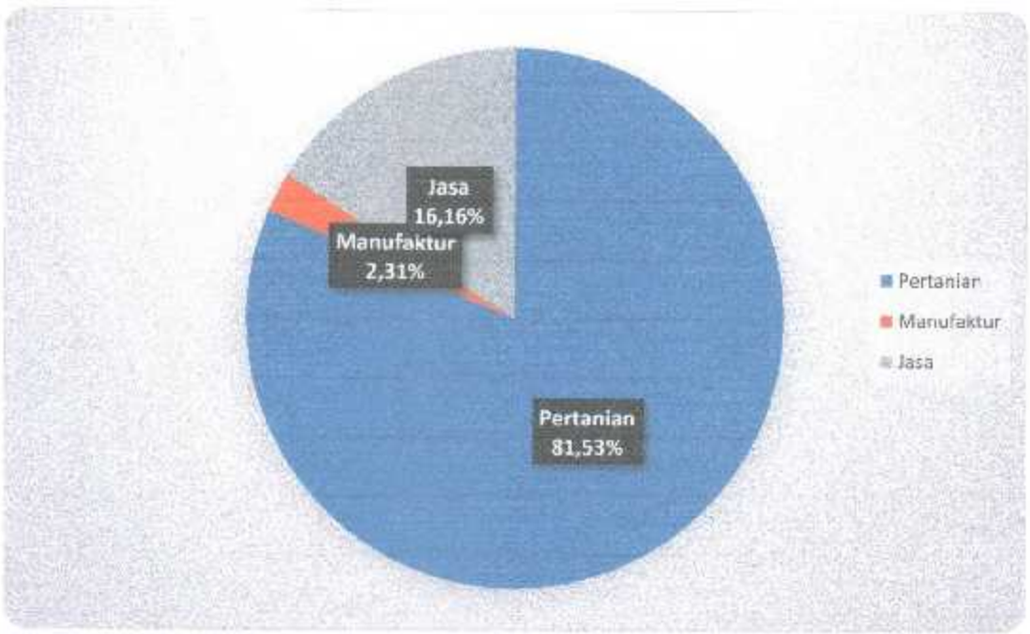

Sumber: BPS Lampung Barat, 2017

OPD | KABAG HUKUM

1.2. Visi dan Misi

1.2.1.Visi

Visi Kabupaten Lampung Barat mencerminkan kondisi Kabupaten Lampung Barat yang ingin dicapai dalam masa jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun. Visi kepala daerah Kabupaten Lampung Barat terpilih untuk masa jabatan tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut (telah disesuaikan dengan kaidah dan prinsip perencanaan pembangunan daerah) :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA"

1.2.2. Misi

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah dacrah periode 2017-2022, rumusan misi pembangunan daerah untuk mencapai visi dapat formulasikan sebagai berikut:

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdayasaing;
3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik;
5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif

OPD | KABAG HUKUM

1.3. Tantangan Permasalahan Literasi dan Peluang Masa Depan

Indonesia dengan sumber daya alam yang kaya dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia berpeluang menjadi negara maju bila sumber daya tersebut dikelola dengan baik. Hasil studi McKinsey Global Institute (2012) yang menempatkan Indonesia di antara tujuh negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030 membangkitkan optimisme baru bagi bangsa dalam meningkatkan daya saing dan kerja samanya di forum internasional. Ini dibuktikan, antara lain, dengan indeks daya saing global Indonesia yang cukup baik, yaitu pada peringkat 41 dari 138 negara. Untuk menjaga agar laju pembangunan Indonesia berada pada kerangka pencapaian cita-cita bangsa menjadi bangsa yang maju, sebagaimana yang diamanatkan pada Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, diperlukan gerakan berskala nasional yang mampu mengatasi berbagai hambatan dan memanfaatkan tantangan menjadi peluang.

Gerakan besar perlu diprioritaskan dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia sebagai indikator kunci peningkatan daya saing bangsa. Keberagaman Indonesia dengan 1.340 etnis dan 646 bahasa daerah serta kondisi geografis dan luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan besar bagi upaya meningkatkan mutu SDM, untuk memastikan layanan pendidikan bagi 268.059 satuan pendidikan, 2.888.548 guru, dan 44.573.106 siswa (PDSPK, 2017).

Beberapa data internasional terkait SDM menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia saat ini berada pada peringkat 113 dari 187 negara (UNDP, 2016), jauh di bawah peringkat negara ASEAN lainnya. Sementara itu, dalam penguasaan literasi, Indonesia menempati urutan 60 dari 61 negara (Central Connecticut State University, 2016). Hasil ini tidak jauh berbeda dengan hasil survei penilaian siswa pada PISA 2015 (diumumkan pada awal Desember 2016) yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-64 dari 72 negara.

OPD | KABAG HUKUM

Selama kurun waktu kurang lebih tiga tahun (2012 – 2015), skor PISA untuk kemampuan membaca hanya naik 1 poin dari 396 menjadi 397, sedangkan sains naik 21 poin dari 382 menjadi 403, dan matematika naik 11 poin dari 375 menjadi 386. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca, khususnya teks dokumen pada anak-anak Indonesia usia 9-14 tahun, berada di peringkat sepuluh terbawah.

Hasil skor Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) atau Indonesia National Assessment Programme (INAP) yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains bagi siswa sekolah dasar juga menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. Meskipun secara nasional kemampuan siswa dikategorikan cukup baik di bidang matematika (77,13%) dan sains (73,61%), kemampuan membaca siswa masih sangat rendah yaitu 46,83%.

Mencermati data-data di atas, rendahnya literasi bangsa menjadi persoalan serius dan memerlukan penanganan khusus untuk melancarkan jalan Indonesia menjadi negara maju. Literasi yang rendah berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas bangsa. Ini berujung pada rendahnya pertumbuhan dan akhirnya berdampak terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan perkapita. Literasi rendah juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan.

Pelaksanaan literasi yang merupakan tantangan kedepan dan merupakan permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki untuk meningkatkan literasi baik secara nasional maupun di Kabupaten Lampung Barat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kualitas pendidikan rendah

   Kualitas pendidikan yang rendah menyebabkan rendahnya kualitas lulusan pada tingkat pendidikan primer, sekunder, maupun pendidikan tinggi. Ini merupakan faktor utama rendahnya tingkat literasi. Kualitas lulusan antara lain ditentukan oleh kualitas atau kompetensi guru. Hasil uji kompetensi guru pada tahun 2015 hanya

OPD | KABAG HUKUM

mencapai nilai rata-rata 53,02% dan kompetensi calon guru hanya mencapai 44%. Kualitas guru di Indonesia masih jauh dari memadai.

2. Peningkatan Infrastruktur pendidikan

   Selanjutnya factor penyediaan infrastruktur pendidikan seperti ketersediaan listrik, laboratorium computer, akses terhadap internet, serta perpustakaan merupakan permasalahan dalam peningkatan literasi.

3. Kekurangan gizi

   Gizi juga merupakan faktor kendala dalam mengatasi masalah rendahnya literasi. Prevalensi balita yang mengalami kekurangan gizi dan tubuh pendek (*stunting*) pada tahun 2010 masing-masing mencapai 17,9% dan 35,6%. Pada tahun 2013 kekurangan gizi mencapai 17,8% dan prevalensi tubuh pendek bahkan naik menjadi 36,8%. Dalam masalah gizi ini Indonesia termasuk 36 negara di dunia yang berkontribusi terhadap 90% masalah gizi dunia.

4. Rendahnya budaya membaca

   Masyarakat Indonesia memang lebih terbiasa mendengar dan berbicara daripada berliterasi. Waktu yang rata-rata orang habiskan untuk menonton televisi dan ngobrol per hari lebih banyak dibandingkan dengan waktu yang disisihkan untuk membaca dan menulis. Menurut Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sampai 2015 pembaca surat kabar hanya 13,1%, sementara penonton televisi mencapai 91,5%. Beberapa lembaga survei menyatakan fakta tentang rendahnya budaya literasi di Indonesia. Programme for International Student Assessment (PISA) menyebutkan, pada tahun 2012 budaya literasi di Indonesia menempati urutan ke-64 dari 65 negera yang disurvei. Pada penelitian yang sama ditunjukkan, Indonesia menempati urutan ke-57 dari 65 negara dalam kategori minat baca. Data UNESCO menyebutkan posisi membaca Indonesia 0.001% yang artinya dari 1.000 orang, hanya ada 1 orang yang memiliki minat baca.

OPD | KABAG HUKUM

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya budaya membaca diatas, antara lain :

a. Kebiasaan Membaca Belum Dimulai dari Rumah

   Aktivitas membaca masih belum dibiasakan dalam ranah keluarga. Orang tua hanya mengajarkan membaca dan menulis pada level bisa, belum terbiasa. Padahal, budaya literasi harus dibiasakan sejak kecil. Misalnya, membiasakan membaca cerita untuk anak atau mengajarkan menulis buku harian.

b. Perkembangan Teknologi yang Makin Canggih

   Teknologi yang makin canggih ternyata turut meninggalkan budaya literasi di Indonesia. Orang-orang lebih suka bermain dengan gawai daripada membaca. Membaca jadi terasa menjemukan dibandingkan dengan bermain gawai. Teknologi yang makin canggih juga diimbangi dengan media sosial yang makin banyak. Media sosial seperti *Facebook, Twitter, Youtube, Instagram*, dan lainnya memungkinkan orang membaca berita palsu. Sebetulnya, berita *hoax* tersebut dapat diperangi dengan budaya literasi. Teknologi yang makin canggih seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan dan bahan literasi.

c. Sarana Membaca yang Minim

   Sarana membaca yang minim ternyata juga membuat kebiasaan membaca ini sulit dilakukan. Sarana tersebut misalnya perpustakaan. Bagaimana kondisi buku di perpustakaan sekolah atau daerah, minimnya koleksi perpustakaan membuat orang-orang malas berkunjung. Selanjutnya sistem inventarisasi perpustakaan yang membutuhkan waktu lama, sering kali menjadi penyebab buku baru tidak bisa segera dipinjam. Selain itu, sistem pengadaan buku yang tidak ditangani oleh orang-orang yang kurang kompeten, membuat koleksi perpustakaan kurang maksimal di beberapa tempat. Ketersediaan buku-buku berkualitas yang minim juga termasuk salah satu penyebab orang malas membaca.

OPD | KABAG HUKUM

d. Kurang Motivasi untuk Membaca

Kurang minat baca adalah penyebab rendahnya budaya literasi di Indonesia. Terkadang, beberapa orang merasa tidak mengerti manfaat membaca sehingga tidak tertarik untuk melakukannya. Membaca membutuhkan waktu khusus memang, tetapi membaca itu memiliki banyak manfaat. Guru yang lebih banyak memberikan ceramah kepada siswa juga ikut melemahkan budaya literasi. Segala informasi sudah didapatkan dari guru sehingga siswa kurang terbiasa membaca. Bahkan, siswa merasa tidak perlu membaca karena menganggap informasi yang datang dari guru selalu benar.

e. Sikap Malas untuk Mengembangkan Gagasan

Literasi tidak hanya membaca, tetapi dilanjutkan dengan menulis. Bagaimana dapat terampil menulis jika jarang membaca? Menulis membutuhkan kosakata yang akan diperoleh dari membaca. Setelah memiliki bahan untuk menulis, tantangan selanjutnya adalah mengembangkan gagasan. Hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup untuk pengendapan ide. Proses itulah yang biasanya membuat orang malas menulis.

Dari beberapa penyebab rendahnya budaya membaca tersebut, maka butuh sebuah kebijakan yang bisa menggerakkan dan membangkitkan budaya literasi dimana kebijakan tersebut tidak hanya sebagai wacana, tetapi juga perlu impelementasi sehingga menghasilkan sebuah bukti konkrit. Sebenarnya ada banyak sekali solusi yang bisa terapkan untuk menumbuhkan budaya membaca pada masyarakat maupun anak-anak.

Yang pertama, yaitu memaksimalkan fungsi perpustakaan sebagai tempat yang nyaman untuk membaca. Sehingga pengunjung akan merasa nyaman dengan suasana perpustakaan yang tidak membosankan. Pihak pemerintah daerah sebagai pengelola perpustakaan umum, atau pihak sekolah, bisa merenovasi ruangan sekreatif dan

OPD | KABAG HUKUM

semenarik mungkin serta menyediakan persediaan buku yang lengkap sesuai dengan usia dan kebutuhan pengunjung. Mulai dari bacaan untuk anak-anak, remaja, hingga dewasa. Baik berupa komik, buku cerita, Novel, buku referensi, dan sebagainya. Sehingga perpustakaan menjadi tempat rujukan untuk mencari apapun seputar literasi.

Yang kedua, adalah penerapan wajib membaca di lingkungan sekolah. Beberapa tahun yang lalu, pemerintah sudah menetapkan kebijakan ini. Namun, di beberapa sekolah, kebijakan ini tidak dijalankan secara efektif. Sehingga lama-lama kebijakan tersebut tidak berlaku lagi. Hal ini juga butuh dorongan dan penekanan dari pihak sekolah untuk mewajibkan siswanya membaca dalam durasi waktu tertentu. Sehingga, akan ada dampak positif dengan dirutinkannya kebijakan ini. Pada akhirnya, budaya membaca itu secara perlahan akan tumbuh dengan sendirinya dalam diri siswa. Karena budaya tersebut muncul dari sebuah kebiasaan.

Yang ketiga, memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dengan melakukan pemerataan pendidikan ke seluruh wilayah pelosok. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan angka melek huruf yang masih terhitung sangat rendah. Pemerataan tersebut bisa dilakukan dengan pembangunan infrastruktur berupa gedung sekolah, penyebaran guru, penyediaan stok buku yang besar, serta pemenuhan fasilitas penunjang lainnya. Karena melek huruf adalah langkah utama untuk membudayakan membaca dan mengentas masyarakat Indonesia dari bencana buta huruf.

Menjawab tantangan permasalahan literasi sekaligus peluang masa depan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 28 Oktober 2017 mencanangkan Gerakan Literasi Nasional (GLN). Gerakan Literasi Nasional merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antarunit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia. Gerakan ini akan dilaksanakan secara menyeluruh dan serentak, mulai

OPD | KABAG HUKUM

dari ranah keluarga sampai ke sekolah dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Meningkatkan literasi bangsa perlu dibingkai dalam sebuah gerakan nasional yang terintegrasi, tidak parsial, sendiri-sendiri, atau ditentukan oleh kelompok tertentu. Gerakan literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua pemangku kepentingan termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, pegiat literasi, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan publik dalam setiap kegiatan literasi menjadi sangat penting untuk memastikan dampak positif dari gerakan peningkatan daya saing bangsa.

Kabupaten Lampung Barat sendiri, merupakan daerah yang memiliki kawasan budidaya terbatas yaitu hanya ±37% dari total luas wilayah dan selebihnya merupakan kawasan lindung dan kawasan konservasi yang ada batasan pengelolaannya. Dari kawasan budidaya yang ada sebesar 21% nya (13.461 Ha) merupakan lahan pertanian. Kemudian bila dilihat dari PDRB Kabupaten Lampung Barat tahun 2015 dapat diambil kesimpulan bahwa struktur perekonomian di Kabupaten Lampung Barat sangat tergantung dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 53,40% dari total PDRB. Hal ini juga mencerminkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan lapangan usaha yang memegang peranan terbesar dan terpenting dalam perkembangan perekonomian di Kabupaten Lampung Barat.

Lebih lanjut lagi bila dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Lampung Barat tahun 2017 mencapai 66,06 atau menduduki urutan ke-9 di Provinsi Lampung. Dimana bila dilihat dari komponen-komponen pendukung IPM-nya maka komponen pengetahuan terutama pada indikator rata-rata sekolah masih cukup rendah yaitu mencapai 7,33 atau menduduki peringkat 11 dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

OPD | KABAG HUKUM

5. Kondisi Kesiapsiagaan Bencana

Lampung Barat merupakan saah satu wilayah dengan potensi gempa yang cukup tinggi ,Adanya sesar Semangko menyebabkan gempa besar di Liwa pada taggal 15 Februari 1994 ,selain gempa ,bencana lonsor juga kerap terjadi di Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan hal tersebut untuk percepatan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan mampu melakukan inovasi dalam pengelolaan potensi alam yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan kualitas hidupnya dan siap bersaing dalam sector lain di era milenial ini. Selain itu, dalam rangka menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas SDM Lampung Barat yang sehat, cerdas dan berdaya saing sekaligus sebagai upaya mendukung keberadaan GLN, maka pada tanggal 2 Mei 2018, Bupati Lampung Barat mencanangkan diri sebagai Kabupaten Literasi. Komitmen tersebut menjadi kebijakan yang strategis dalam rangka mendukung arah dan kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat.

Dengan merujuk aturan perundang-undangan yang berlaku dan Pedoman Gerakan Literasi Nasional, Kabupaten Literasi dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan daya saing bangsa melalui penguatan ekosistem pendidikan. Hal ini sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membentuk insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong.

OPD | KABAG HUKUM

BAB 2

PENGUATAN LITERASI

2.1. Pentingnya Literasi

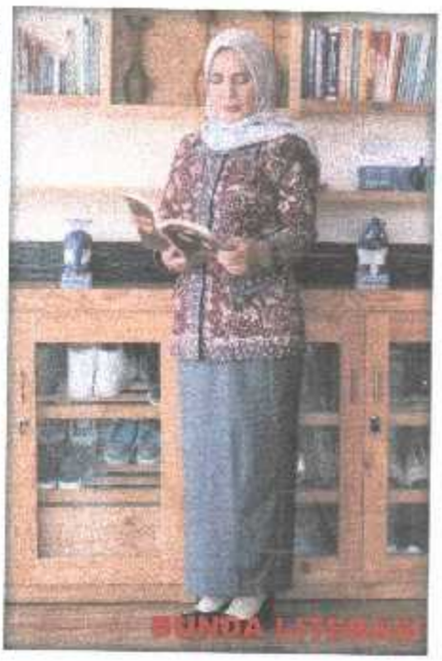

Literasi dasar, kompetensi dan karakter merupakan jenis-jenis *soft skill* yang dibutuhkan dan perlu dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia pada abad ke-21 yang diisyaratkan oleh Forum Ekonomi Dunia 2015. Peningkatan daya saing regional merupakan tema pembangunan pendidikan pada periode 2015–2019. Periode ini ditetapkan pula sebagai era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mendorong peningkatan daya saing antarnegara agar mampu bersaing di kawasan regional dan global.

Pemahaman literasi secara umum adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya (Education Development Center). Untuk mampu bersaing, warga dunia harus memiliki kompetensi yang meliputi berpikir kritis/memecahkan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Sementara itu, untuk memenangkan persaingan, masyarakat harus memiliki karakter yang kuat yang meliputi iman dan takwa, rasa ingin tahu, inisiatif, kegigihan, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, serta kesadaran sosial dan budaya.

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini semakin meneguhkan pentingnya penguatan literasi dasar, kompetensi, dan karakter bangsa Indonesia. Merebaknya berita bohong di media sosial dan rentannya

OPD KABAG HUKUM

ikatan kebhinekaan ditengarai sebagai akibat kurangnya pemahaman literasi (khususnya literasi informasi dan literasi kewargaan), rendahnya kompetensi, dan rapuhnya karakter masyarakat. Mudahnya masyarakat memberi dan/atau menerima berita bohong berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai poros pendidikan sepanjang hayat, literasi harus terus ditingkatkan karena tingkat literasi suatu bangsa berkorelasi positif dengan kualitas hidup dan kemajuan bangsa. Sejarah bangsa kita pun mencatat bahwa para pendiri bangsa yang mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka dan bermartabat adalah orang-orang dengan budaya literasi yang sangat baik. Mereka adalah para pembaca buku yang menuangkan pemikiran-pemikirannya dengan menulis.

Pendidikan menjadi prioritas utama dalam membangun dan meningkatkan kualitas manusia. Literasi sebagai instrumen kunci dalam meningkatkan kualitas hidup harus diperkenalkan kepada peserta didik sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, literasi tidak hanya dipahami sebagai transformasi individu semata, tetapi juga sebagai transformasi sosial. Rendahnya tingkat literasi sangat berkorelasi dengan kemiskinan, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti yang lebih luas.

Literasi memperkuat kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk mengakses kesehatan, pendidikan, serta ekonomi dan politik. Dalam konteks kekinian, literasi memiliki arti tidak hanya sekadar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga melek ilmu pengetahuan dan teknologi, keuangan, budaya dan kewargaan, berpikiran kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus menguasai literasi yang dibutuhkan untuk dijadikan bekal dalam mencapai dan menjalani kehidupan yang berkualitas, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

OPD | KABAG HUKUM

2.2. Dampak Literasi Rendah

Berdasarkan laporan UNESCO yang berjudul "*The Social and Economic Impact of Illiteracy*" yang dirilis pada tahun 2010, tingkat literasi rendah mengakibatkan kehilangan atau penurunan produktivitas, tingginya beban biaya kesehatan, kehilangan proses pendidikan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sosial dan terbatasnya hak advokasi akibat rendahnya partisipasi sosial dan politik. Literasi rendah juga, menurut UNESCO, menimbulkan dampak antara lain tingginya kecelakaan kerja dan tingginya prevalensi sakit akibat pekerjaan.

Dampak antara literasi rendah juga muncul dalam persoalan kesehatan masyarakat, karena masyarakat dengan literasi rendah juga umumnya memiliki kesadaran rendah akan kebersihan makanan dan gizi buruk dan memiliki perilaku seksual berisiko tinggi. Akibatnya, prevalensi penyakit seksual, kehamilan, aborsi, kelahiran, kematian tinggi. Selanjutnya literasi rendah juga berdampak pada tingginya angka putus sekolah dan pengangguran yang berdampak pada rendahnya kepercayaan diri. Orang dengan tingkat literasi rendah sulit menjadi mandiri atau berdaya, dan tergantung secara ekonomi pada pada keluarga, kerabat, dan negara. Kriminalitas, penyalahgunaan obat dan alkohol, serta kemiskinan dan kesenjangan, juga merupakan dampak dari rendahnya tingkat literasi.

Berdasarkan laporan Bank Dunia tingginya kesenjangan di Indonesia saat ini sebagian besar disebabkan kesenjangan keterampilan (*skill gap*) yang tentunya terjadi karena rendahnya tingkat literasi. Tanpa melakukan upaya perbaikan terhadap tingkat literasi akan sangat sulit bagi Indonesia untuk dapat menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan tingkat kesenjangan. Oleh karena itu kunci dalam meningkatkan produktivitas bangsa dan menurunkan angka kemiskinan serta menurunkan tingkat kesenjangan terletak pada keberhasilan kita dalam mengatasi masalah literasi.

OPD | KABAG HUKUM

2.3. Literasi Sebagai Gerakan Nasional

Gerakan literasi di Indonesia identik dengan upaya pemberantasan buta aksara. Pada awal 1900-an, program ini lebih banyak dilakukan oleh organisasi sosial kemasyarakatan. Pada periode sebelum Kebangkitan Nasional (1908–1928), pendidikan diselenggarakan oleh orang tua, komunitas, dan orang-orang tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus sebagai bagian dari otoritas kekuasaan. Pada periode Pergerakan Kebangsaan (1928–1945), upaya pemberantasan buta huruf lebih berorientasi pada nasionalisme dan kemerdekaan. Penggeraknya adalah tokoh-tokoh, perkumpulan, dan masyarakat. Pemberantasan buta huruf pada masa itu masih terbatas karena Belanda tidak bersungguh-sungguh ingin mencerdaskan bangsa Indonesia. Pada periode awal kemerdekaan (1945–1950), Bagian Pendidikan Masyarakat pada Kementerian Pendidikan dan Pengajaran mulai dibentuk, yang selanjutnya berubah menjadi Jawatan Pendidikan Masyarakat pada 1949. Pada periode ini, program pemberantasan buta aksara mulai terorganisasi dengan jumlah penduduk buta aksara mencapai 95%.

Berikutnya, pada periode Pemberantasan Buta Huruf Massal (1950–1974), penduduk Indonesia yang masih buta huruf diperkirakan sebanyak 40%. Pada masa ini, kegiatan pemberantasan buta aksara dilakukan melalui komando Presiden Soekarno sehingga kegiatannya disambut masyarakat. Badan-badan di tingkat pusat dan daerah mulai terbentuk. Pada 31 Desember 1964, Ir. Soekarno Presiden RI saat itu memproklamasikan kepada dunia luar bahwa semua penduduk Indonesia usia 13–45 tahun sudah bebas buta huruf, kecuali Irian Barat.

Pada periode Pemberantasan Buta Huruf Paket A (1974–1990), Kemendikbud mengembangkan paket belajar pendidikan dasar bagi orang dewasa. Paket ini dikenal juga dengan PBH Kejar Paket A fungsional. Pada periode ini sudah dikenalkan Paket A1 sampai Paket A100. Pemerintah menyiapkan 100 modul dengan beberapa tingkatan dan klasifikasi. Pada 1974 Presiden Soeharto menerbitkan Inpres tentang Program Sekolah Dasar. Pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan

OPD | KABAG HUKUM

dan infrastruktur berskala besar. Bangunan sekolah dasar dibangun di seluruh penjuru tanah air. Angka partisipasi sekolah dasar meningkat, dari 41,4% pada 1968 menjadi 79,3% pada 1978. Pada 1984 diluncurkan program Pendidikan Wajib Belajar 6 Tahun. Gencarnya pembangunan gedung sekolah untuk memberi akses seluas-luasnya kepada anak-anak usia sekolah berimbas pada angka partisipasi sekolah dasar yang pada akhir 1980 mencapai hampir 100%.

Pada tahun 1991-2000 disebut periode Keaksaraan Fungsional, pemberantasan buta aksara lebih difokuskan pada strategi diskusi, membaca, menulis, berhitung, dan kegiatan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari dengan mengacu pada kebutuhan lokal, desain lokal, serta partisipasi dan fungsionalisasi hasil belajar. Pada periode Pendidikan Keaksaraan (2000–2006), jumlah penduduk Indonesia yang masih buta aksara diperkirakan 9%. Pada tahun 2002, angka melek aksara masyarakat Indonesia mencapai 89,51%. Untuk mencapai target tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP PWB-PBA). Melalui gerakan ini, semua komponen bangsa dilibatkan, baik di pusat maupun di daerah. Pada periode ini mulai diterapkan standar kompetensi lulusan (SKL) sebagai upaya mengawal kualitas lulusan keaksaraan.

Pada 2015 penduduk Indonesia yang masih buta aksara mencapai 3,56% atau 5,7 juta. Angka ini melebihi target yang ditetapkan pada 2002, yaitu 5%. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan pada fokus pemberantasan buta aksara. Melalui penerbitan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, gerakan literasi diarahkan pada kegiatan pembelajaran. Pemberantasan buta aksara terus bergulir seiring dengan pelaksanaan gerakan literasi.

OPD | KABAG HUKUM

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 kemudian mendorong munculnya Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Gerakan Indonesia Membaca (GIM) di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, dan Gerakan Literasi Bangsa (GLB) di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Untuk mewadahi dan memfasilitasi gerakan literasi di lingkungan Kemendikbud, pada tahun 2016 dibentuk Gerakan Literasi Nasional (GLN). Secara garis besar, GLN melingkupi gerakan literasi di sekolah, keluarga, dan masyarakat. pada tanggal 28 Oktober 2017. Selanjutnya gerakan nasional ini ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan mencanangkan diri sebagai Kabupaten Literasi pada tanggal 2 Mei 2018 bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional.

Secara lebih ringkas, sejarah pergerakan literasi nasional sejak awal pendirian bangsa Indonesia sampai sekarang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

OPD | KABAG HUKUM

Gambar 2.1

Peta Gerakan Literasi

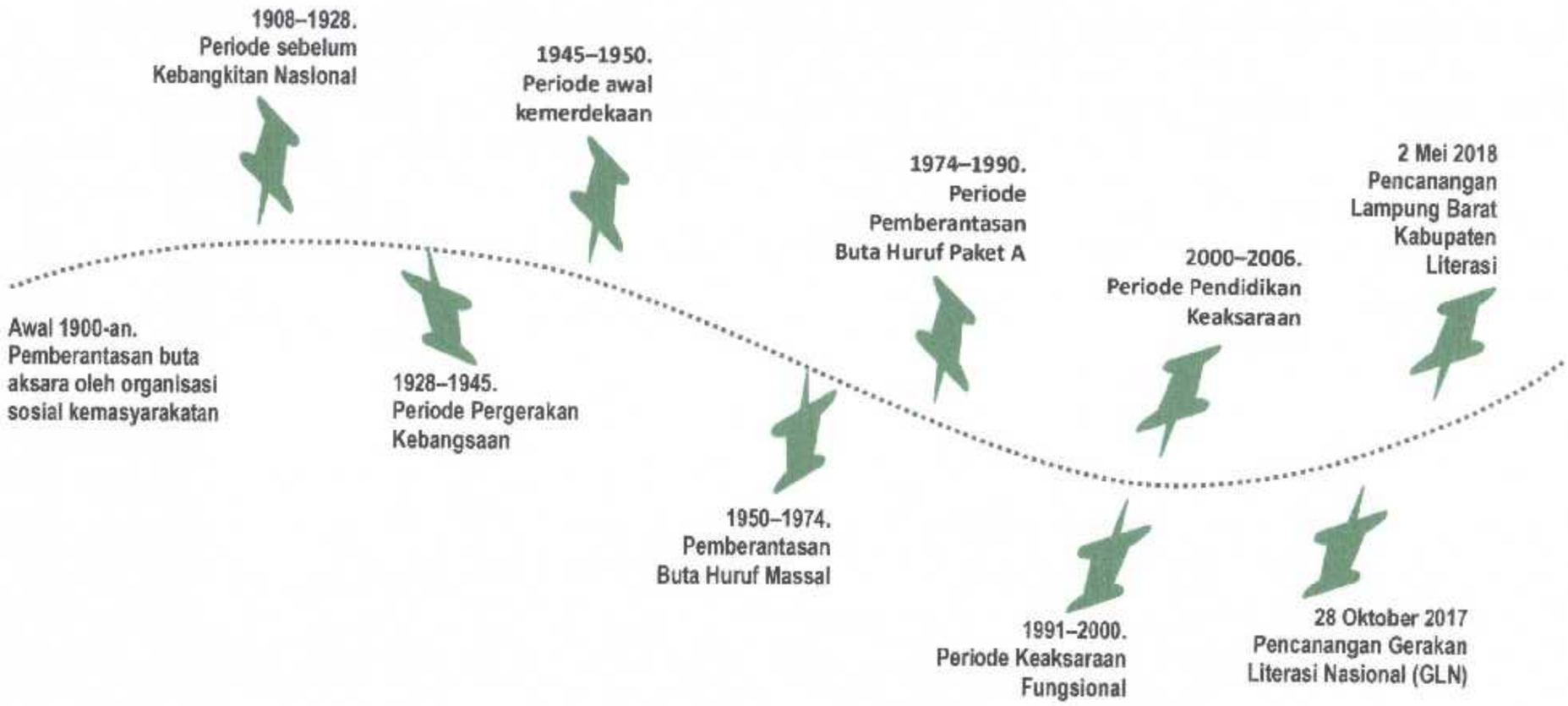

OPD | KABAG HUKUM

2.4. Prinsip Gerakan Literasi

Gerakan literasi dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Berkesinambungan

Sebagai suatu gerakan, literasi harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, tidak bergantung pada pergantian pemerintahan. Literasi harus menjadi program prioritas pemerintah yang selalu dikampanyekan kepada seluruh lapisan masyarakat, pemimpin, tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekia, remaja, orang tua, dan warga masyarakat sehingga budaya literasi terbentuk di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

b. Terintegrasi

Pelaksanaan literasi harus terintegrasi dengan program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dan kementerian dan/atau lembaga lain, termasuk nonpemerintah. Dengan demikian, literasi menjadi bagian yang saling menguatkan dengan program lain.

c. Melibatkan Semua Pemangku Kepentingan

Sebagai suatu gerakan, literasi harus memberikan kesempatan dan peluang untuk keterlibatan semua pemangku kepentingan, baik secara individual maupun kelembagaan. Literasi harus menjadi milik bersama, menyenangkan, dan mudah dilaksanakan, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.

2.5. Dimensi Literasi

Dimensi Literasi yang merupakan literasi dasar meliputi 6 (enam) dimensi yaitu antara lain :

a. Literasi Baca dan Tulis

Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks

OPD KABAG HUKUM

tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial.

b. Literasi Numerasi

Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk (a) bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan symbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari; (b) bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) untuk mengambil keputusan.

c. Literasi Sains

Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains.

d. Literasi Digital

Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

e. Literasi Finansial

Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan (a) pemahaman tentang konsep dan risiko, (b) keterampilan, dan (c) motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.

OPD | KABAG HUKUM

f. Literasi Budaya dan Kewargaan

Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat.

2.6. Ranah Literasi

Ranah literasi atau biasa disebut dengan gerakan literasi terdiri dari 3 (tiga) gerakan literasi, yaitu gerakan literasi sekolah, gerakan literasi keluarga dan gerakan literasi masyarakat.

1) Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan gerakan literasi yang aktivitasnya banyak dilakukan di sekolah dengan melibatkan siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta orang tua. GLS dilakukan dengan menampilkan praktik baik tentang literasi dan menjadikannya sebagai kebiasaan serta budaya di lingkungan sekolah. Literasi juga dapat diintegrasikan dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari semua rangkaian kegiatan siswa dan pendidik, baik di dalam maupun di luar kelas. Pendidik dan tenaga kependidikan tentu memiliki kewajiban moral sebagai teladan dalam hal berliterasi. Agar lebih masif, program GLS melibatkan partisipasi publik, seperti pegiat literasi, orang tua, tokoh masyarakat, dan profesional. Dalam pelaksanaannya, GLS memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu :

1) berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi;
2) bersifat berimbang,;
3) terintegrasi dengan kurikulum;
4) kegiatan membaca dan menulis dilakukan di mana pun
5) mengembangkan budaya lisan, dan
6) mengembangkan kesadaran pada keberagaman.

OPD | KABAG HUKUM

Implementasi 6 (enam) dimensi literasi kedalam Gerakan Literasi Sekolah antara lain :

1. Literasi Baca-Tulis

Tujuan literasi baca-tulis di lingkungan sekolah mencakup:

1. Meningkatnya sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang ditunjukkan melalui keterampilan baca-tulis disertai ekspresi sesuai dengan budaya Indonesia;
2. Meningkatnya kemampuan siswa dalam literasi baca-tulis;
3. Meningkatnya partisipasi publik dalam berbagai kegiatan baca-tulis;
4. Tumbuhnya budaya baca-tulis di sekolah sebagai kebutuhan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi baca tulis di sekolah adalah sebagai berikut :

1. Basis Kelas
   a. Jumlah pelatihan fasilitator literasi baca-tulis untuk kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan;
   b. Intensitas pemanfaatan dan penerapan literasi numerasi dalam kegiatan pembelajaran, baik berbasis masalah maupun berbasis proyek; dan
   c. Skor literasi membaca dalam PISA, PIRLS, dan INAP
2. Basis Budaya Sekolah
   a. Jumlah dan variasi bahan bacaan;
   b. Frekuensi peminjaman bahan bacaan di perpustakaan;
   c. Jumlah kegiatan sekolah yang berkaitan dengan literasi baca-tulis;
   d. Terdapat kebijakan sekolah mengenai literasi baca-tulis;
   e. Jumlah karya (tulisan) yang dihasilkan siswa dan guru; dan
   f. Terdapat komunitas baca-tulis di sekolah.
3. Basis Masyarakat
   a. Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi baca-tulis di sekolah; dan
   b. Tingkat keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan literasi baca-tulis di sekolah.

OPD | KABAG HUKUM

2. Literasi Numerasi

Literasi numerasi di sekolah bersifat praktis (digunakan dalam kehidupan sehari-hari), rekreasi (misalnya, memahami skor dalam olahraga dan permainan), dan kultural (sebagai bagian dari pengetahuan mendalam dan kebudayaan dari manusia madani). Selain itu, literasi numerasi berkaitan dengan kewarganegaraan (memahami isu-isu dalam komunitas) dan profesional (isu-isu dalam pekerjaan). Cakupan literasi numerasi sangat luas, tidak hanya di dalam mata pelajaran matematika, tetapi juga beririsan dengan literasi lainnya, misalnya, literasi kebudayaan dan kewargaan.

Tujuan literasi numerasi di lingkungan sekolah mencakup:

1. Meningkatnya kesadaran guru terhadap penggunaan numerasi dalam pembelajaran;
2. Meningkatnya pandangan dan sikap positif peserta didik terhadap numerasi;
3. Meningkatnya budaya berpikir sistematis, rasional dan dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan numerasi di sekolah;
4. Meningkatnya kemampuan peserta didik dalam literasi numerasi;
5. Meningkatnya kecakapan multiliterasi melalui literasi numerasi;

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi numerasi di sekolah adalah:

1. Basis Kelas
   a. Jumlah pelatihan guru matematika dan non-matematika
   b. Intensitas pemanfaatan dan penerapan numerasi dalam pembelajaran
   c. Jumlah pembelajaran matematika berbasis permasalahan dan pembelajaran matematika berbasis proyek
   d. Jumlah pembelajaran non-matematika yang melibatkan unsur literasi numerasi
   e. Nilai Skor Matematika Pisa/TIMSS/INAP

OPD | KABAG HUKUM

2. Basis Budaya Sekolah
    a. Jumlah dan variasi bahan bacaan literasi numerasi
    b. Frekuensi peminjaman bahan bacaan literasi numerasi
    c. Jumlah kegiatan literasi numerasi di sekolah
    d. Jumlah penyajian informasi dalam bentuk presentasi numerasi (contoh: grafik frekuensi peminjaman buku di perpustakaan)
    e. Adanya kebijakan sekolah mengenai literasi numerasi
    f. Akses situs daring yang berhubungan dengan literasi numerasi
    g. Alokasi dana untuk literasi numerasi
    h. Adanya tim literasi sekolah
3. Basis Masyarakat
    a. Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi numerasi di sekolah
    b. Keterlibatan orangtua dan masyarakat dalam mengembangkan literasi numerasi di sekolah

3. Literasi Sains

Literasi sains di sekolah dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang dasar-dasar berbagai cabang sains dan kemampuan untuk mengaplikasikan sains dasar di sekolah sehingga dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dapat dilakukan, antara lain, dengan cara mengidentifikasi pertanyaan, menginterpretasi data dan bukti sains, serta menarik simpulan yang berkenaan dengan alam dan pemeliharaannya.

Tujuan literasi sains di lingkungan sekolah mencakup:

1. Tumbuhnya kesadarpahaman untuk peduli terhadap lingkungan dan pemeliharaannya;
2. Tumbuhnya budaya berpikir inkuiri (mengamati, selalu bertanya dalam mengidentifikasi masalah, melakukan eksplorasi, dan melakukan penarikan simpulan hingga ke tahap pengambilan keputusan) dalam memecahkan permasalahan sains;

OPD | KABAG HUKUM

3. Menguatnya kebiasaan berpikir saintifik, seperti selalu ingin tahu (*wonderment*), berpikir terbuka (*open minded*), kreatif, memperhatikan keselamatan, dan menjadi penentu keputusan;
4. Tumbuhnya kecakapan untuk menghubungkan konsep yang dipelajari di sekolah dengan konteks fenomena alam sekitarnya; dan
5. Menguatnya kolaborasi dalam perancangan visi dan misi terkait dengan literasi sains yang melibatkan warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi sains di sekolah adalah sebagai berikut.

1. Basis Kelas
   a. Jumlah pelatihan guru sains dan nonsains;
   b. Intensitas pemanfaatan dan penerapan literasi sains dalam pembelajaran;
   c. Jumlah pembelajaran sains berbasis permasalahan dan berbasis proyek;
   d. Jumlah pembelajaran nonsains yang melibatkan unsur literasi sains;
   e. Skor literasi sains dalam PISA/TIMSS/INAP; dan
   f. jumlah produk yang dihasilkan peserta didik melalui pembelajaran sains berbasis proyek
2. Basis Budaya Sekolah
   a. Jumlah dan variasi bahan bacaan literasi sains;
   b. Frekuensi peminjaman bahan bacaan literasi sains;
   c. Jumlah kegiatan literasi sains di sekolah;
   d. Akses situs daring yang berhubungan dengan literasi sains;
   e. Jumlah kegiatan bulan literasi sains;
   f. Alokasi dana untuk literasi sains;
   g. Adanya tim literasi sekolah;
   h. Adanya kebijakan sekolah mengenai literasi sains; dan

OPD | KABAG HUKUM

i. Jumlah penyajian informasi literasi sains dalam berbagai bentuk. (Contoh: infografis dan alat peraga tentang proses terjadinya hujan)

3. Basis Masyarakat
   a. Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi sains; dan
   b. Keterlibatan orangtua dan masyarakat dalam mengembangkan literasi di sekolah.

4. Literasi Digital

Literasi digital di sekolah diarahkan agar siswa, pendidik, guru, dan tenaga kependidikan memiliki kemampuan dalam mengakses, memahami, dan menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, dan jaringannya. Melalui kemampuan tersebut, mereka dapat mengolah dan membuat informasi baru, kemudian menyebarkannya secara bijak. Selain mampu menguasai dasar-dasar komputer, internet, program-program produktif, serta keamanan dan kerahasiaan sebuah aplikasi, mereka juga diharapkan memiliki gaya hidup digital sehingga semua aktivitas kesehariannya tidak lepas dari pola pikir dan perilaku masyarakat digital yang serba efektif dan efisien.

Tujuan literasi digital di lingkungan sekolah mencakup:

1. Meningkatnya kemampuan berfikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam menggunakan media digital dan internet di lingkungan sekolah;
2. Meningkatnya sikap positif, bijak, cermat, dan tepat dalam menggunakan dan mengelola media digital dan internet di lingkungan sekolah;
3. Meningkatnya keterampilan anggota keluarga dalam menggunakan media digital dan internet di lingkungan sekolah;
4. Meningkatnya akses sekolah dalam menggunakan media digital dan internet; dan

OPD | KABAG HUKUM

5. Meningkatnya partisipasi publik dalam mengembangkan literasi digital di sekolah (melaui pelatihan, penyediaan akses, dan penyediaan bahan bacaan).

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi digital di sekolah adalah sebagai berikut.

1. Basis Kelas
   a. Jumlah pelatihan literasi digital bagi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan;
   b. Intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran; dan
   c. Tingkat pemahaman kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, dan siswa dalam menggunakan media digital dan internet.
2. Basis Budaya Sekolah
   a. Jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital;
   b. Frekuensi peminjaman buku bertema digital;
   c. Jumlah kegiatan di sekolah yang memanfaatkan teknologi dan informasi;
   d. Jumlah penyajian informasi sekolah dengan menggunakan media digital atau laman;
   e. Jumlah kebijakan sekolah tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan sekolah; dan
   f. Tingkat pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal layanan sekolah (misalnya, rapot e, pengelolaan keuangan, dapodik, pemanfaatan data siswa, profil sekolah, dsb.).
3. Basis Masyarakat
   a. Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi digital di sekolah; dan

OPD | KABAG HUKUM

b. Tingkat keterlibatan orang tua, komunitas, atau lembaga dalam pengembangan literasi digital;

5. Literasi Finansial

Literasi finansial di sekolah dapat dimaknai sebagai keterampilan dan kemampuan siswa, pendidik, dan tenaga pendidik dalam mengelola keuangan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Dalam hal ini, mereka diharapkan mampu menghasilkan, memanfaatkan, merencanakan, mengelola keuangan secara taktis, efisien, dan bijak untuk kesejahteraan hidupnya.

Tujuan literasi finansial di lingkungan sekolah mencakup:

1. meningkatnya frekuensi pemanfaatan bahan bacaan literasi finansial;
2. meningkatnya pengetahuan dan keterampilan finansial di lingkungan sekolah;
3. tumbuhnya budaya literasi finansial, seperti gaya hidup jujur, ugahari, menabung, berbagi, dan praktik baik lainnya di sekolah; dan
4. tumbuhnya partisipasi lembaga keuangan di lingkungan sekolah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi finansial di sekolah adalah sebagai berikut.

1. Basis Kelas
   a. Meningkatnya jumlah pelatihan literasi finansial untuk kepala sekolah, guru, dan manajemen sekolah;
   b. Meningkatnya intensitas pemanfaatan dan penerapan literasi numerasi dalam kegiatan pembelajaran; dan
   c. Meningkatnya skor literasi finansial berdasarkan OJK dan lembaga lainnya.
2. Basis Budaya Sekolah
   a. Meningkatnya jumlah dan variasi buku dan alat peraga berbasis literasi finansial;

OPD | KABAG HUKUM

b. Meningkatnya frekuensi peminjaman bahan bacaan literasi finansial;
c. Meningkatnya jumlah kegiatan literasi finansial ;
d. Terdapatnya kebijakan sekolah terkait literasi finansial;
e. Meningkatnya jumlah penyajian informasi literasi finansial;
f. Meningkatnya akses situs daring dan luring yang berhubungan dengan literasi finansial; dan
g. Terdapatnya lembaga keuangan sekolah yang aktif (bank sekolah atau koperasi).

3. Basis Masyarakat
   a. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi finansial di sekolah; dan
   b. Meningkatnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan literasi finansial di sekolah.

6. Literasi Budaya dan Kewargaan

Literasi budaya dan kewargaan di sekolah dapat dipahami sebagai kemampuan siswa, guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Meskipun titik sasar pelaksanaannya di sekolah, aktivitas literasi budaya dan kewargaan juga dapat dilakukan di luar sekolah, misalnya, di perpustakaan daerah, bank, dan kantor pemerintah atau swasta.

Tujuan literasi budaya dan kewargaan di lingkungan sekolah mencakup:

1. Meningkatnya pembiasaan penggunaan budaya di lingkungan sekolah (bahasa daerah, pakaian adat, dll.);
2. Tumbuhnya minat dan keingintahuan tentang budaya;
3. Menguatnya sikap hormat dan taat terhadap aturan yang ada di sekolah;
4. Menguatnya sikap toleransi terhadap keberagaman di lingkungan sekolah;

OPD | KABAG HUKUM

5. Meningkatnya partisipasi aktif siswa dalam kegiatan yang ada di sekolah; dan
6. Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan terhadap hak dan kewajiban sebagai warga sekolah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi budaya dan kewargaan di sekolah adalah sebagai berikut.

1. Basis Kelas
   a. Jumlah pelatihan tentang literasi budaya dan kewargaan untuk kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan;
   b. Intensitas pemanfaatan dan penerapan literasi budaya dan kewargaan dalam pembelajaran; dan
   c. Jumlah produk budaya yang dimiliki dan dihasilkan sekolah.
2. Basis Budaya Sekolah
   a. Jumlah dan variasi bahan bacaan bertema budaya dan kewargaan;
   b. Frekuensi peminjaman buku bertemakan budaya dan kewargaan di perpustakaan;
   c. Jumlah kegiatan sekolah yang berkaitan dengan budaya;
   d. Terdapat kebijakan sekolah yang dapat mengembangkan literasi budaya dan nillai-nilai kewargaan sekolah;
   e. Terdapat komunitas budaya di sekolah;
   f. Tingkat ketertiban siswa terhadap aturan sekolah;
   g. Tingkat toleransi siswa terhadap keberagaman yang ada di sekolah; dan
   h. Tingkat partisipasi aktif siswa dalam kegiatan di sekolah.
3. Basis Masyarakat
   a. Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi budaya dan kewargaan; dan
   b. Tingkat keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan literasi budaya dan kewargaan.

OPD | KABAG HUKUM

2) Gerakan Literasi Keluarga (GLK)

Gerakan Literasi Keluarga (GLK) bertitik tolak pada keinginan untuk meningkatkan kemampuan literasi anggota keluarga. Oleh karena itu, pemahaman literasi sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi, mencari, memperoleh, mengolah, dan menginformasikan kembali informasi perlu ditingkatkan di ranah keluarga. Untuk meningkatkan kemampuan literasi tersebut, peran keluarga sangat penting. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, dalam konteks pendidikan, menjadi lingkungan pembelajaran pertama dan utama bagi anak-anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi keluarga adalah rangkaian kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam keluarga untuk meningkatkan kemampuan literasi seluruh anggota keluarga.

Implementasi 6 (enam) dimensi literasi kedalam Gerakan Literasi Keluarga antara lain :

1. Literasi Baca-Tulis

Literasi baca-tulis di keluarga dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Gerakan literasi baca-tulis dalam keluarga dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis semua anggota keluarga melalui pembiasaan mengolah hasil bacaan dan menindaklanjuti hasil bacaan tersebut dalam bentuk kegiatan nyata yang bermanfaat bagi anggota keluarga.

Tujuan literasi baca-tulis di lingkungan keluarga mencakup:

1. meningkatnya pandangan dan sikap positif terhadap Bahasa Indonesia yang ditunjukkan melalui keterampilan baca-tulis disertai ekspresi sesuai dengan budaya Indonesia;
2. tumbuhnya budaya baca-tulis di keluarga sebagai kebutuhan; dan
3. meningkatnya partisipasi keluarga dalam kegiatan literasi baca-tulis.

OPD | KABAG HUKUM

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi baca-tulis di keluarga adalah:

1. jumlah dan variasi bahan bacaan yang dimiliki keluarga;
2. frekuensi membaca dalam keluarga setiap harinya;
3. jumlah bacaan yang dibaca oleh anggota keluarga;
4. jumlah tulisan anggota keluarga (memo, kartu ucapan baik cetak maupun elektronik, catatan harian di buku atau blog, artikel, cerpen, atau karya sastra lain); dan
5. jumlah pelatihan literasi baca-tulis yang aplikatif dan berdampak pada keluarga.

2. Literasi Numerasi

Literasi numerasi di keluarga diutamakan untuk meningkatkan kemampuan semua anggota keluarga dalam ranah literasi numerasi sehingga kualitas hidup keluarga meningkat. Anggota keluarga dapat memanfaatkan literasi keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam mendapatkan informasi, mengolah, dan membaginya kepada keluarga atau orang lain.

Tujuan literasi numerasi di lingkungan keluarga mencakup:

1. tumbuhnya pandangan dan sikap positif terhadap numerasi;
2. tumbuhnya budaya berpikir sistematis, rasional, dan dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan numerasi dalam kehidupan sehari-hari; dan
3. tumbuhnya pemahaman dan kecakapan penggunaan data numerasi dalam pengambilan keputusan di keluarga.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi numerasi di keluarga adalah:

1. jumlah dan variasi bahan bacaan literasi numerasi yang dimiliki setiap keluarga;
2. frekuensi membaca bahan bacaan literasi numerasi dalam keluarga setiap harinya;

OPD | KABAG HUKUM

3. jumlah bahan bacaan literasi numerasi yang dibaca oleh anggota keluarga;
4. frekuensi kesempatan anak mengaplikasikan numerasi dalam kehidupan sehari-hari; dan
5. jumlah pelatihan literasi numerasi yang aplikatif dan berdampak pada keluarga.

3. Literasi Sains

Literasi sains di keluarga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang berbagai dasar-dasar literasi sains, termasuk kemampuan untuk mengaplikasikan sains dasar agar kehidupan anggota keluarga menjadi lebih baik.

Tujuan literasi sains di lingkungan keluarga mencakup:

1. meningkatnya kepedulian keluarga terhadap lingkungan serta pemeliharaannya;
2. menguatnya budaya berpikir saintifik, seperti selalu ingin tahu (*wonderment*), berpikir terbuka (*open minded*), kreatif, memperhatikan keselamatan, dan menjadi penentu keputusan di keluarga; dan
3. meningkatnya pola komunikasi yang saintifik antara orang tua dan anak (contoh: menggugah rasa ingin tahu anak dengan pola 5W+1H yang membangun nalar anak untuk mengetahui dampak dari setiap keputusannya).

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi sains di keluarga adalah:

1. jumlah dan variasi bahan bacaan literasi sains yang dimiliki keluarga;
2. frekuensi membaca bahan bacaan literasi sains dalam keluarga setiap harinya;
3. jumlah bahan bacaan literasi sains yang dibaca oleh anggota keluarga;

OPD | KABAG HUKUM

4. frekuensi kesempatan anak mengaplikasikan sains dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga;
5. jumlah permainan edukatif berbasis literasi sains dalam keluarga; dan
6. jumlah pelatihan literasi sains yang aplikatif dan berdampak pada keluarga.

2. Literasi Digital

Literasi digital di keluarga mengutamakan peningkatan pengetahuan anggota keluarga tentang dasar-dasar teknologi informasi dan komunikasi serta kemampuan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi. Sasarannya adalah kemampuan anggota keluarga dalam menggunakan dan mengelola media digital (teknologi informasi dan komunikasi) secara bijak, cerdas, cermat, dan tepat agar kebutuhan keluarga terpenuhi dan komunikasi dan interaksi antaranggota keluarga berlangsung dengan lebih harmonis.

Tujuan literasi digital di lingkungan keluarga mencakup:

1. meningkatnya kemampuan berfikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam menggunakan media digital dalam kehidupan sehari-hari;
2. meningkatnya sikap positif, bijak, cermat, dan tepat dalam menggunakan dan mengelola media digital;
3. meningkatnya keterampilan anggota keluarga dalam menggunakan media digital; dan
4. meningkatnya akses keluarga dalam menggunakan media digital dan internet.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi digital di keluarga adalah :

1. jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki keluarga;

OPD | KABAG HUKUM

2. frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital dalam keluarga setiap harinya;
3. jumlah bacaan literasi digital yang dibaca oleh anggota keluarga;
4. frekuensi akses anggota keluarga terhadap penggunaan internet secara bijak;
5. intensitas pemanfaatan media digital dalam berbagai kegiatan di keluarga; dan
6. jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada keluarga.

1. Literasi Finansial

Literasi finansial di keluarga dapat dipahami sebagai peningkatan keterampilan dan kemampuan anak dan orang tua dalam mengelola keuangan untuk kualitas hidup yang lebih baik. Anak diharapkan dapat mengetahui, merencanakan, dan memanfaatkan uang dengan efektif dan efisien. Sementara itu, orang tua diharapkan mampu menghasilkan, memanfaatkan, merencanakan, serta mengelola keuangan secara taktis, efisien, dan bijak untuk kesejahteraan hidupnya.

Tujuan literasi finansial di lingkungan keluarga mencakup:

1. tumbuhnya kesadaran anggota keluarga untuk memiliki perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan yang baik dan sesuai dengan tujuan finansial keluarga;
2. meningkatnya pengetahuan dan keterampilan finansial di lingkungan keluarga, seperti menentukan skala prioritas dalam pemenuhan dasar keluarga serta menjadi konsumen yang baik; dan
3. tumbuhnya budaya literasi finansial, seperti gaya hidup jujur, menabung, berbagi, dan praktik baik lainnya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi finansial di keluarga adalah :

1. jumlah dan variasi bahan bacaan literasi finansial yang dimiliki keluarga;

OPD | KABAG HUKUM

2. frekuensi membaca bahan bacaan literasi finansial dalam keluarga setiap harinya;
3. jumlah bacaan literasi finansial yang dibaca oleh anggota keluarga;
4. jumlah pelatihan literasi finansial yang aplikatif dan berdampak pada keluarga;
5. jumlah produk keuangan yang digunakan dalam keluarga, seperti tabungan, asuransi, dan investasi;
6. tingkat pemahaman konsep tentang fungsi dasar keuangan, seperti cara menghasilkan uang atau mata pencaharian serta alat tukar barang dan jasa; dan
7. tingkat keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan finansial dalam kehidupan sehari-hari.

6. Literasi Budaya dan Kewargaan

Literasi budaya dan kewargaan di keluarga dapat dipahami sebagai kemampuan orang tua dan anak-anak dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Tujuannya adalah agar anggota keluarga dapat memanfaatkan kemampuannya itu untuk kehidupan sehari-hari, baik dalam berinteraksi antaranggota keluarga, antarkeluarga, maupun antarindividu dalam masyarakat.

Tujuan literasi budaya dan kewargaan di lingkungan keluarga mencakup:

1. menguatnya kesadaran anggota keluarga terhadap budaya lokal dan nasional;
2. meningkatnya pembiasaan penggunaan budaya di lingkungan keluarga;
3. meningkatnya minat dan keingintahuan tentang budaya;
4. menguatnya sikap menghargai dan peduli sesama anggota keluarga;

OPD | KABAG HUKUM

5. meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga; dan
6. menguatnya kerukunan antaranggota keluarga.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi budaya dan kewargaan di keluarga adalah:

1. jumlah dan variasi bahan bacaan literasi budaya yang dimiliki keluarga;
2. frekuensi membaca bahan bacaan literasi budaya dalam keluarga setiap harinya;
3. jumlah bacaan literasi budaya yang dibaca oleh anggota keluarga;
4. jumlah pelatihan literasi budaya yang aplikatif dan berdampak pada keluarga;
5. jumlah kegiatan kebudayaan yang diikuti anggota keluarga;
6. tingkat kunjungan keluarga ke tempat yang bernilai budaya (rumah adat, museum, keraton, dll.);
7. tingkat pemahaman keluarga terhadap nilai-nilai budaya;
8. jumlah produk budaya yang dimiliki keluarga;
9. jumlah dan variasi bahan bacaan literasi kewargaan yang dimiliki keluarga;
10. frekuensi membaca bahan bacaan literasi kewargaan dalam keluarga setiap harinya;
11. jumlah bacaan literasi kewargaan yang dibaca oleh anggota keluarga;
12. jumlah pelatihan literasi kewargaan yang aplikatif dan berdampak pada keluarga; dan
13. intensitas waktu bersama keluarga untuk berdiskusi, berkomunikasi, dan berbagi.

OPD | KABAG HUKUM

3) Gerakan Literasi Masyarakat

Gerakan Literasi Masyarakat merupakan gerakan berupa kegiatan-kegiatan literasi yang dilakukan untuk masyarakat tanpa memandang usia. Sebagai poros pendidikan sepanjang hayat bagi masyarakat, program-program gerakan literasi di masyarakat bertujuan untuk menjaga agar kegiatan membangun pengetahuan dan belajar bersama di masyarakat terus berdenyut dan berkelanjutan. Melalui Gerakan Literasi Masyarakat yang sejalan dengan Gerakan Literasi Sekolah dan Gerakan Literasi Keluarga diharapkan dapat lahir dan tumbuh simpul-simpul masyarakat yang mempunyai kemampuan literasi tingkat tinggi. Oleh karena itu, kegiatan yang dikembangkan dalam Gerakan Literasi Masyarakat adalah kegiatan yang mencakup enam literasi, yaitu literasi baca-tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewargaan.

1. Literasi Baca-Tulis

Literasi baca-tulis di masyarakat dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat. Melalui gerakan ini, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan merefleksikan tulisan dalam mencapai suatu tujuan, serta mengembangkan pengetahuan dan potensi untuk dapat berpartisipasi di masyarakat.

Tujuan literasi baca-tulis di lingkungan masyarakat mencakup:

1. tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik;
2. meningkatnya sikap positif masyarakat terhadap Bahasa Indonesia yang ditunjukkan melalui keterampilan baca-tulis disertai ekspresi sesuai dengan budaya Indonesia;
3. meningkatnya kecakapan membaca dan menulis di msyarakat; dan
4. meningkatnya budaya baca-tulis di masyarakat.

OPD | KABAG HUKUM

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi baca-tulis di masyarakat adalah:

1. jumlah dan variasi bahan bacaan yang dimiliki fasilitas publik;
2. frekuensi membaca bahan bacaan setiap hari;
3. jumlah bahan bacaan yang dibaca oleh masyarakat;
4. jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga, atau instansi dalam penyediaan bahan bacan;
5. jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi baca-tulis;
6. jumlah kegiatan literasi baca-tulis yang ada di masyarakat;
7. jumlah komunitas baca-tulis di masyarakat;
8. tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi;
9. jumlah publikasi buku per tahun;
10. kuantitas pengguna bahasa Indonesia di ruang publik; dan
11. jumlah pelatihan literasi baca-tulis yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat.

2. Literasi Numerasi

Literasi numerasi di masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan kebiasaan masyarakat agar mampu menggunakan literasi numerasi dalam menjalani dan meningkatkan taraf hidupnya.

Tujuan literasi numerasi di lingkungan masyarakat mencakup:

1. meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan numerasi dalam kehidupan sehari-hari;
2. meningkatnya budaya berpikir sistematis, rasional, dan dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan numerasi di masyarakat;
3. meningkatnya kecakapan penggunaan data numerasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat (misalnya, dalam pemanfaatan anggaran desa); dan
4. meningkatnya penggunaan numerasi di ruang publik.

OPD | KABAG HUKUM

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi numerasi di masyarakat adalah:

1. jumlah dan variasi bahan bacaan literasi numerasi yang dimiliki fasilitas publik;
2. frekuensi membaca bahan bacaan literasi numerasi setiap hari;
3. jumlah bahan bacaan literasi numerasi yang dibaca oleh masyarakat setiap hari;
4. jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga, atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi numerasi;
5. jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi numerasi;
6. jumlah kegiatan literasi numerasi yang ada di masyarakat;
7. tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi numerasi;
8. peningkatan kecakapan penggunaan data numerasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat (misalnya, dalam pemanfaatan anggaran desa);
9. jumlah penyajian informasi dalam bentuk presentasi numerasi (misalnya, informasi harga kebutuhan pokok di ruang publik); dan
10. jumlah pelatihan literasi numerasi yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat.

3. Literasi Sains

Literasi sains di masyarakat tidak jauh berbeda dengan literasi sains di keluarga, yaitu upaya peningkatan pengetahuan tentang berbagai dasar literasi sains, termasuk kemampuan untuk mengaplikasikan sains dasar dalam kehidupan bermasyarakat sehingga bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik.

Tujuan literasi sains di lingkungan masyarakat mencakup:

1. meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara alam;

OPD | KABAG HUKUM

2. menguatnya budaya berpikir saintifik, seperti selalu ingin tahu (*wonderment*), berpikir terbuka (*open minded*), kreatif, memperhatikan keselamatan, dan menentukan keputusan di masyarakat; dan
3. meningkatnya inisiatif masyarakat dalam mengaplikasikan kegiatan sains.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi sains di masyarakat adalah:

1. jumlah dan variasi bahan bacaan literasi sains yang dimiliki setiap desa;
2. frekuensi membaca bahan bacaan literasi sains setiap hari;
3. jumlah bahan bacaan literasi sains yang dibaca oleh masyarakat setiap hari;
4. jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga, atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi sains;
5. jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi sains;
6. jumlah kegiatan literasi sains yang ada di masyarakat;
7. tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi sains;
8. tingkat penggunaan data sains dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat;
9. jumlah komunitas sains yang aktif di setiap daerah;
10. jumlah pelatihan literasi sains yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat;
11. indeks kualitas lingkungan hidup (contoh: air, udara, dan tanah); dan
12. jumlah pelatihan literasi sains yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat.

OPD | KABAG HUKUM

4. Literasi Digital

Literasi digital di masyarakat merupakan keterampilan berpikir kritis dan kreatif masyarakat terhadap informasi dan komunikasi sebagai warga global dengan bertanggung jawab dan beretika dalam menggunakan perangkat media digital. Tujuannya adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat agar memanfaatkan teknologi dan komunikasi dengan menggunakan teknologi digital dan alat-alat komunikasi atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan membuat informasi secara bijak dan kreatif. Oleh karena itu, fitur-fitur yang perlu dipahami mencakup dasar-dasar komputer, penggunaan internet dan program-program produktif, keamanan dan kerahasiaan, gaya hidup digital, dan kewirausahaan.

Tujuan literasi digital di lingkungan masyarakat mencakup:

1. meningkatnya kesadaran dan keterbukaan masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dan komunikasi dan komunikasi di berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari;
2. meningkatnya kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan media digital dan internet secara bijak;
3. meningkatnya ketersediaan fasilitas publik yang mendukung pengembangan literasi digital; dan
4. meningkatnya partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam pengembangan literasi digital dalam masyarakat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi digital di masyarakat adalah:

1. jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki fasilitas publik;
2. frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap hari;

OPD | KABAG HUKUM

3. jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap hari;
4. jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga, atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi digital;
5. jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital;
6. jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat;
7. tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital; jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat;
8. tingkat pemanfaatan media digital dan internet dalam memberikan akses informasi dan layanan publik;
9. tingkat pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet dan UU ITE;
10. angka ketersediaan akses dan pengguna (melek) internet di suatu daerah; dan
11. jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat.

1. Literasi Finansial

Literasi finansial di masyarakat merupakan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan untuk peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Tujuannya adalah agar masyarakat sebagai konsumen mampu menghasilkan, memanfaatkan, merencanakan, dan mengelola keuangan secara baik untuk kesejahteraan hidupnya.

Tujuan literasi finansial di lingkungan masyarakat mencakup:

1. meningkatnya kecakapan penggunaan data finansial dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat (contoh: dalam pemanfaatan anggaran desa);

OPD | KABAG HUKUM

2. meningkatnya fasilitas publik yang terkait dengan literasi finansial di masyarakat;
3. meningkatnya inklusi keuangan di masyarakat dengan pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang aman;
4. menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial;
5. meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan perkapita masyarakat;
6. terbukanya lapangan pekerjaan diiringi dengan meningkatnya wirausaha, UMKM, dan UKM;
7. turunnya angka kejahatan finansial; dan
8. meningkatnya frekuensi pemanfaatan bahan bacaan literasi finansial.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi finansial di masyarakat adalah:

1. jumlah dan variasi bahan bacaan literasi finansial yang dimiliki fasilitas publik;
2. frekuensi membaca bahan bacaan literasi finansial setiap hari;
3. jumlah bahan bacaan literasi finansial yang dibaca oleh masyarakat setiap hari;
4. jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga, atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi finansial;
5. jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi finansial;
6. jumlah kegiatan literasi finansial yang ada di masyarakat;
7. tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi finansial;
8. jumlah pelatihan literasi finansial yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat;
9. tingkat ketersediaan akses informasi dan layanan finansial di seluruh Indonesia;
10. jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan yang dibuktikan dengan hasil survei oleh lembaga keuangan yang kredibel;

OPD | KABAG HUKUM

11. jumlah fasilitas publik yang terkait dengan literasi finansial di masyarakat, seperti perpustakaan dan taman bacaan masyarakat (TBM) yang memiliki sumber referensi literasi finansial;
12. angka pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial yang dibuktikan oleh hasil suvei (contoh: Badan Pusat Statistik, World Bank);
13. tingkat pendapatan perkapita masyarakat kelas menengah dan bawah yang dibuktikan dengan hasil sensus nasional oleh lembaga negara yang berwenang;
14. terbukanya lapangan pekerjaan diiringi dengan meningkatnya wirausaha dan UMKM yang dibuktikan oleh lembaga negara yang berwenang; dan
15. angka kejahatan finansial (contoh: laporan atau survei POLRI, KPK, OJK, BPK, dan lembaga lainnya).

2. Literasi Budaya dan Kewargaan

Literasi budaya dan kewargaan di masyarakat dapat dipahami sebagai kemampuan anggota masyarakat dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Tujuannya adalah agar anggota masyarakat dapat memanfaatkan kemampuannya itu untuk kehidupan sehari-hari yang lebih baik.

Tujuan literasi budaya dan kewargaan di lingkungan masyarakat mencakup:

1. meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara budaya;
2. tumbuhnya minat dan keingintahuan masyarakat tentang budaya;
3. meningkatnya pembiasaan penggunaan budaya di masyarakat (bahasa daerah, pakaian adat, tarian adat, dll.);

OPD | KABAG HUKUM

4. menguatnya sikap hormat dan taat terhadap aturan yang ada di masyarakat;
5. menguatnya sikap toleransi terhadap keberagaman di masyarakat;
6. meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan terhadap hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat;
7. menguatnya kerukunan antar anggota masyarakat;
8. meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan yang ada di lingkungan sekitar; dan
9. tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam mendorong tersedianya fasilitas publik di lingkungan sekitar (contoh: membangun pos keamanan dan lingkungan).

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi budaya dan kewargaan di masyarakat adalah:

1. jumlah dan variasi bahan bacaan literasi budaya yang dimiliki setiap desa;
2. frekuensi membaca bahan bacaan literasi budaya setiap hari;
3. jumlah bahan bacaan literasi budaya yang dibaca oleh masyarakat setiap hari;
4. jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan;
5. jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi budaya;
6. jumlah kegiatan literasi budaya yang ada di masyarakat;
7. tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi budaya;
8. jumlah pelatihan literasi budaya yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat;
9. jumlah kegiatan budaya di masyarakat;
10. jumlah produk budaya yang dimiliki dan dihasilkan oleh masyarakat;
11. tingkat penggunaan bahasa daerah di suatu daerah;

OPD | KABAG HUKUM

12. jumlah dan variasi bahan bacaan literasi kewargaan yang dimiliki fasilitas publik;
13. frekuensi membaca bahan bacaan literasi kewargaan setiap hari;
14. jumlah bahan bacaan literasi kewargaan yang dibaca oleh masyarakat setiap hari;
15. jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga, atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan;
16. jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi kewargaan;
17. jumlah kegiatan literasi kewargaan yang ada di masyarakat;
18. tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi kewargaan;
19. jumlah pelatihan literasi kewargaan yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat;
20. tingkat ketertiban masyarakat terhadap aturan di suatu daerah;
21. tingkat toleransi masyarakat terhadap keberagaman di suatu daerah;
22. tingkat ketersediaan akses informasi dan layanan publik; dan
23. angka kejahatan di masyarakat.

2.7. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pelaksanaan Kabupaten Literasi di Kabupaten Lampung Barat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Gerakan Literasi Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/380/KPTS/IV.03/2019 tentang Tim Koordinasi Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM



BAB 3
ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN KABUPATEN LITERASI

3.1. Arah Kebijakan Pelaksanaan Kabupaten Literasi

3.1.1.Isu Strategis-RPJMD 2017-2022

Landasan yang digunakan untuk menetapkan Kabupaten Literasi sebagai komitmen pemerintah daerah dimulai dari inventarisasi isu-isu strategis yang terkait literasi. Beberapa isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat yang mempengaruhi pelaksanaan literasi, sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yaitu antara lain :

a. Pengendalian jumlah penduduk melalui KB dan pembangunan keluarga;
b. Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia;
c. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun secara berkualitas;
d. Penguatan tata kelola pendidikan;
e. Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca;
f. Pelestarian warisan budaya;
g. Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak;
h. Peningkatan perlindungan anak dan efektifitas kelembagaan perlindungan anak;
i. Pemanfaatan IPTEK bagi pembangunan daerah; dan
j. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur.

OPD | KABAG HUKUM

Setelah isu-isu strategis yang terkait dengan literasi teridentifikasi, maka selanjutnya dibuat agenda prioritas arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat.

3.1.2.Arah Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi agenda utama pada setiap periode pemerintahan. Janji tersebut dipertegas pada batang tubuh UUD, Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Selain itu, Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Selama periode 2012 hingga 2016, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Lampung Barat telah meningkat. Pertumbuhan yang positif Rata-rata Lama Sekolah merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Lampung Barat yang lebih baik. Hingga Tahun 2016, secara rata-rata penduduk Kabupaten Lampung Barat usia 25 Tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I). Meskipun terus mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Rata-rata Lama Sekolah Indonesia, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Barat masih berada dibawah Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Rata-rata Lama Sekolah Indonesia.

OPD | KABAG HUKUM

Perkembangan Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Indoncsia Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 3.1.

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.

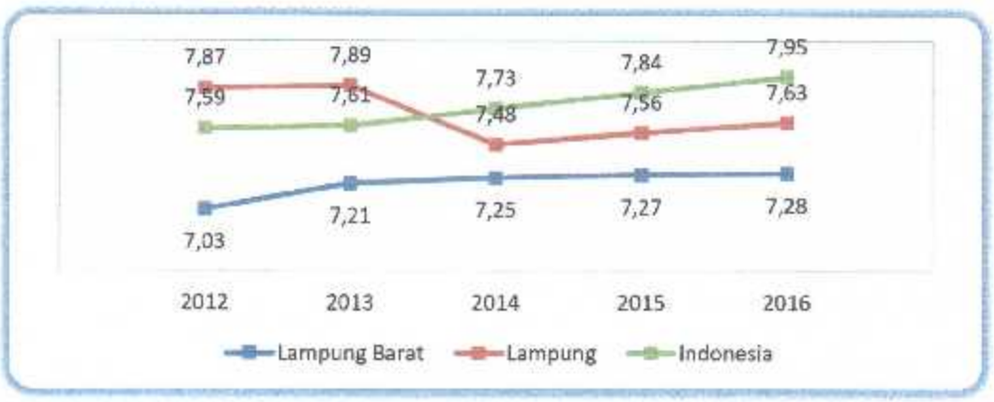

Sumber: BPS Lampung, 2017

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lampung Barat berada diurutan ke 10. Gambar di bawah ini berikut menyajikan data perbandingan rata-rata lama sekolah antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Gambar 3.2.

Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung Tahun 2016



Sumber: BPS Lampung, 2017

OPD | KABAG HUKUM

Angka partisipasi murni adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.

APM jenjang pendidikan SD dari Tahun 2012 hingga 2015 terus meningkat namun turun di Tahun 2016. Sementara itu, APM jenjang pendidikan SMP dari Tahun 2012 hingga Tahun 2016 hanya mengalami penurunan Tahun 2015. Secara lebih rinci APM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2016 di sajikan dalam Gambar di bawah ini.

Gambar 3.3.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.

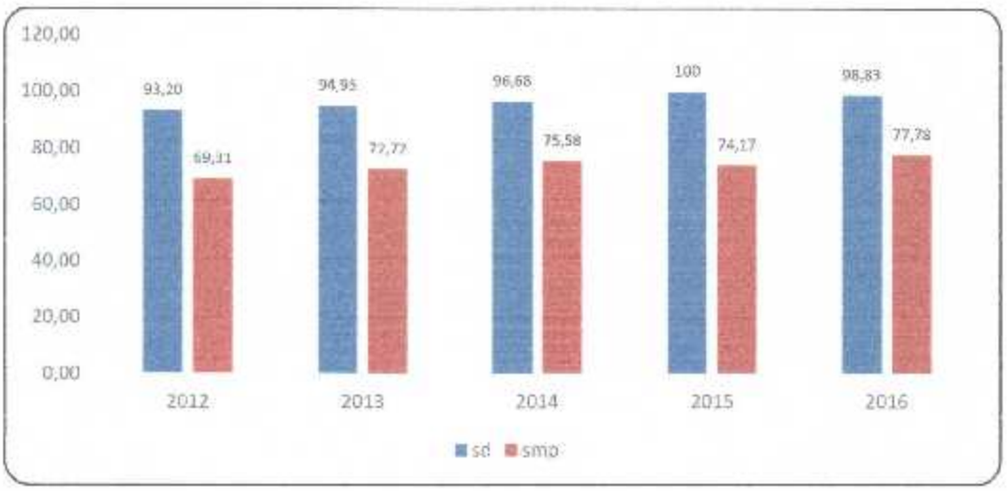

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2012-2016

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

OPD

Gambar 3.4.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat

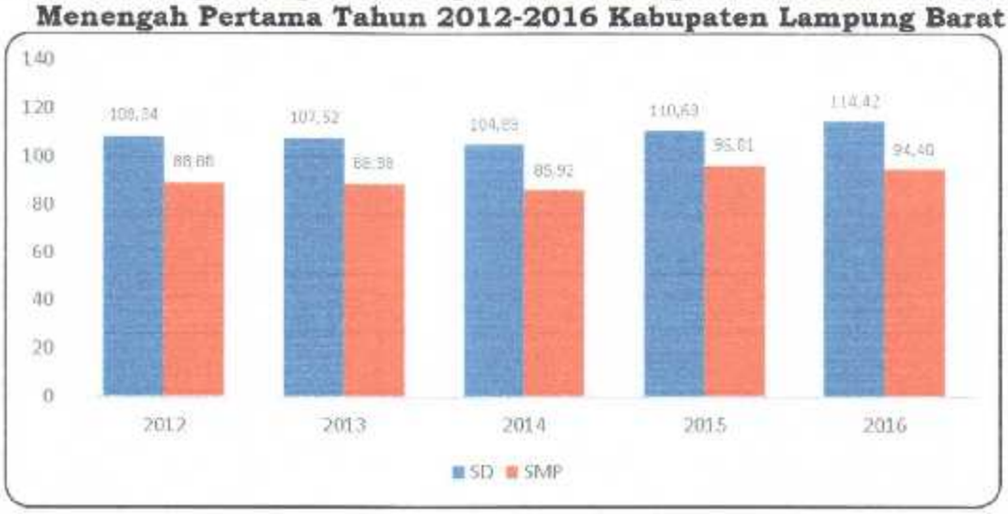

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2012-2016

Angka partisipasi Kasar SD dari Tahun 2012 hingga Tahun 2014 cendrung menurun, pada Tahun 2015 meningkat dan di Tahun 2016 kembali menurun. Angka partisipasi Kasar SMP dari Tahun 2012 hingga Tahun 2014 cendrung menurun, pada Tahun 2015 meningkat dan di Tahun 2016 kembali menurun.

3.1.3.Pengintegrasian Kabupaten Literasi dalam RPJMD

Pengintegrasian Kebijakan Kabupaten Literasi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, adalah sebagai berikut:

- Termasuk dalam Misi Kedua yaitu :
  "Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing"

OPD | KABAG HUKUM

- Untuk mencapai misi tersebut ditetapkan dalam Tujuan 2.1 yaitu : "Terwujudnya masyarakat Lampung Barat yang berdaya saing" dengan indikator tujuannya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditergetkan dari 66,06 di tahun 2017 menjadi 69,34 di tahun 2022.

- Selanjutnya untuk mencapai target indicator tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran prioritas yang mendukung pencapaian pelaksanaan Kabupaten Literasi yaitu antara lain :
  a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat dengan indicator sasaran adalah penanganan kasus gizi buruk yang ditergetkan 100% per tahun
  b. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dengan indicator sasaran sebagai berikut :
     - Angka Partisipasi Kasar (APK) dengan target SD dari 111,83% di tahun 2017 menjadi 111,93% pada tahun 2022 dan SMP dari 99,31% ditahun 2017 menjadi 99,95% pada tahun 2022;
     - Angka Partisipasi Murni (APM) dengan target SD 100% setiap tahun dan SMP dari 91,8% ditahun 2017 menjadi 91,99% pada tahun 2022;
     - Angka rata-rata lama sekolah dengan target 7,28 tahun di tahun 2017 menjadi 7,44 tahun pada tahun 2022;
     - Angka harapan lama sekolah dengan target 12,17 tahun di tahun 2017 menjadi12,35 tahun pada tahun 2022;
     - Angka melanjutkan sekolah dengan target 90,1% di tahun 2017 menjadi 90,85% pada tahun 2022;
     - Nilai Rata-rata Ujian Nasional (UN) dengan target SD dari 209,91 di tahun 2017 menjadi 210,31 pada tahun 2022 dan SMP dari 235,81 ditahun 2017 menjadi 236,31 pada tahun 2022.
  c. Meningkatnya minat baca masyarakat dengan indicator sasaran adalah angka kunjungan yang menjadi anggota perpustakaan yang ditargetkan meninngkat dari 1,74% tahun 2017 menjadi 2,99% pada tahun 2022

OPD | KABAG HUKUM

3.2. Rencana Aksi Kabupaten Literasi

Rencana aksi (*action plan*) Kabupaten Literasi adalah suatu rencana kegiatan yang lebih terperinci untuk menterjemahkan strategi-stretegi dan arahan pelaksanaan Kabupaten Literasi yang telah diindikasikan dalam rencana stretegis kedalam program-program dan kegiatan-kegiatan pendukung.

A. Visi

Sebuah visi sangat diperlukan untuk menggambarkan cerminan impian pemimpin terhadap pelaksanaan Kabupaten Literasi kedepannya. Oleh karena itu maka disusunlah visi Kabupaten Literasi yaitu "Literasi untuk Kesejahteraan Rakyat".

B. Tujuan

Tujuan Kabupaten Literasi adalah menumbuhkembangkan 6 (enam) dimensi literasi untuk meningkatkan daya saing masyarakat melalui penguatan ekosistem pendidikan yang dimulai dari keluarga, sekolah dan masyarakat

C. Sasaran

Terlaksananya kebijakan literasi daerah secara terintegrasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

D. Sasaran Strategis

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
2. Meningkatnya minat baca pelajar dan masyarakat
3. Meningkatnya dukungan pemangku kepentingan/publik berkapasitas dan terlibat aktif dalam mewujudkan Kabupaten Literasi sesuai dengan perannya masing-masing
4. Memperkuat kelembagaan literasi di Kabupaten Lampung Barat

OPD | KABAG HUKUM

E. Strategi

1.1 Meningkatkan kapasitas fasilitator

1.2 Meningkatkan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu

1.1 Memperluas akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar

3.1 Meningkatkan pelibatan public

4.1 Menguatkan tata kelola

F. Kebijakan

1.1.1 Peningkatan kualitas SDM fasilitator literasi sekolah tentang konsep, cara implementasi, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi pengembangan literasi siswa di lingkungan sekolah

1.1.2 Peningkatan kualitas SDM fasilitator literasi keluarga tentang konsep, cara implementasi aktivitas literasi di lingkungan keluarga

1.1.3 Peningkatan kualitas SDM fasilitator literasi masyarakat tentang konsep, cara implementasi, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi pengembangan literasi di lingkungan masyarakat

1.2.1 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung gerakan literasi di sekolah

1.2.2 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung gerakan literasi di lingkungan keluarga

1.2.3 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung gerakan literasi di lingkungan masyarakat

1.1.1 Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber literasi dan perluasan cakupan peserta literasi di sekolah

1.1.2 Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber literasi dan perluasan cakupan peserta literasi di lingkungan keluarga

1.1.3 Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber literasi dan perluasan cakupan peserta literasi di lingkungan masyarakat

3.1.1 Peningkatan keterlibatan semua pemangku literasi dalam mendukung gerakan literasi di sekolah

OPD | KABAG HUKUM

3.1.2 Peningkatan keterlibatan semua pemangku literasi dalam mendukung gerakan literasi di lingkungan keluarga

3.1.3 Peningkatan keterlibatan semua pemangku literasi dalam mendukung gerakan literasi di lingkungan masyarakat

4.1.1 Peningkatan kolaborasi dan sinergi pengelolaan gerakan literasi di sekolah

4.1.2 Peningkatan kolaborasi dan sinergi pengelolaan gerakan literasi di lingkungan keluarga

4.1.3 Peningkatan kolaborasi dan sinergi pengelolaan gerakan literasi di lingkungan masyarakat

G. Program dan Kegiatan Rencana Aksi Beserta OPD Penanggung Jawab

Program dan kegiatan rencana aksi Kabupaten Literasi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kabupaten Literasi selama tahun 2019-2022 sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Program dan Kegiatan Rencana Aksi dan OPD Penanggung Jawab

Program	Kegiatan	OPD
I. Program Peningkatan kualitas SDM fasilitator di sekolah	1. Workshop Implementasi kurikulum yang terintegrasi dengan literasi di sekolah 2. Workshop Kelompok Kerja Guru (KKG) tentang literasi di sekolah 3. Pelatihan mainan edukatif 4. Forum diskusi literasi di sekolah 5. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dalam melaksanakan literasi di sekolah 6. Pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran guru yang terintegrasi dengan literasi di sekolah 7. Pelatihan penyusunan Karya tulis ilmiah bagi guru 8. Workshop penggunaan media pembelajaran yang terintegrasi dengan literasi sekolah 9. Pelatihan Manajemen komite sekolah yang terintegrasi dengan literasi sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

OPD | KABAG HUKUM

II. Peningkatan kualitas SDM fasilitator literasi di lingkungan keluarga	1. Penyuluhan literasi keluarga 2. Pelatihan kader tribina	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III. Peningkatan kualitas SDM fasilitator literasi di lingkungan masyarakat	1. Penyusunan modul literasi daerah 2. Pelatihan menulis bagi masyarakat	Balitbang Tim GLD
IV. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung gerakan literasi	1. Pengembangan literasi digital 2. Penyediaan alat peraga dan mainan edukatif 3. Lomba menulis bagi siswa, guru dan tenaga pendidik	Diskominfo Disdikbud Disdikbud
V. Peningkatan sarpras untuk mendukung kegiatan perpustakaan	1. Pengayaan Bahan Pustaka 2. Penyediaan buku non pelajaran 3. Pengembangan ruang baca perpustakaan 4. Pembangunan ruang baca terbuka	Dinas Perpust Disdikbud Dinas Perpust Dinas Perpust
VI. Program PAUD	1. Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa 2. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa 3. Pengadaan Alat Bermain edukatif	Disdikbud Disdikbud Disdikbud
VII. Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar pendukung gerakan literasi keluarga	1. Pembinaan Penyediaan perpustakaan keluarga 2. Pembinaan penciptaan lingkungan keluarga yg dekat dengan literasi	Dinas PP, KB, PPPA Dinas PP, KB, PPPA
VIII. Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar pendukugerakan literasi masyarakat	1. Optimalisasi sumber dan bahan bacaan di pekon 2. Penyediaan akses internet untuk menjangkau bahan belajar daring di pekon	Dinas PMP Dinas Kominfo
IX. Perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar	1. Pengembangan sarana penunjang yang membentuk ekosistem sekolah kaya literasi 2. Penyediaan laboratorium terkait literasi 3. Penyediaan "sudut literasi" di kelas dan tempat-tempat strategis sekolah 4. Gerakan Optimalisasi perpustakaan sekolah 5. Penyelenggaraan *Open House* sekolah literasi 6. Pengimbasan sekolah literasi 7. Kampanye literasi sekolah 8. Pengadaan Sarana perpustakaan (Pengadaan bentor keliling)	Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Dinas Perpust

OPD | KABAG HUKUM

X. ***Perluasan akses sumber dan perluasan cakupan peserta literasi keluarga***	1. Gerakan Nasional Orangtua Baca Buku (Gernasorbaku)	Dinas PP, KB, PPPA
XI. ***Perluasan akses sumber dan perluasan cakupan peserta literasi masyarakat***	1. Penyediaan "sudut baca" di pekon, RS/Puskesmas, instansi perkantoran dan fasilitas umum lainnya	Dinas Perpust
	2. Kampanye Literasi melalui media massa, cetak, elektronik	Dinas Kominfo/Humas
	3. Penggalakan Senam Literasi	Disporapar
	4. Pembinaan Sanggar Seni Lampung Barat	Disdikbud
XII. ***Peningkatan pelibatan publik untuk pengembangan literasi sekolah***	1. Forum diskusi dengan tokoh dan pegiat berbagai bidang	Disdikbud
	2. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)	Disdikbud
	3. Festival Literasi Sekolah/Gebyar Literasi Pelajar	Disdikbud
	4. Lomba menulis cerita rakyat budaya	Disdikbud
	5. Lomba Inovasi guru dalam Pembelajaran yang terintegrasi literasi	Disdikbud
	6. Pelibatan BUMN dan DUDI dalam kegiatan literasi di sekolah	Tim GLD
	7. Festival literasi budaya	Disdikbud
XIII. ***Peningkatan pelibatan publik untuk pengembangan literasi di lingkungan keluarga***	1. Pengembangan keluarga percontohan literasi	Dinas PP, KB, PPPA
XIV. ***Peningkatan pelibatan publik untuk pengembangan literasi di lingkungan masyarakat***	1. Pembentukan Gerakan Literasi Daerah tingkat Kecamatan dan Pekon	Tim GLD
	2. Festival Literasi	Dinas Perpust
	3. Lomba mendongeng interaktif	Disdikbud
	4. Peningkatan kerja sama dengan BUMN dan DUDI dalam mendukung pengembangan literasi di masyarakat	Dinas PMP
XV. ***Penguatan tatakelola pengembangan literasi di sekolah***	1. Penguatan komitmen sekolah dalam pengalokasian waktu dan anggaran untuk mendukung literasi di sekolah	Disdikbud
	2. Pembentukan Tim Literasi Sekolah	Disdikbud
	3. Forum komite sekolah berbasis literasi	Disdikbud
	4. Pengembangan sekolah percontohan literasi	Disdikbud
	5. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Literasi	Disdikbud
	6. Fasilitasi penguatan ketatalaksanaan kebijakan	Balibang

OPD | KABAG HUKUM

	strategis gerakan literasi di sekolah	
	7. Monitoring dan evaluasi kebijakan strategis gerakan literasi sekolah	Balitbang/Bappeda
XVI. Penguatan tatakelola pengembangan literasi di lingkungan keluarga	1. Pengalokasian waktu tertentu dalam keluarga untuk melakukan aktivitas bersama yang berkaitan dengan litersi melalui Gerakan Dacrah Matikan TV pukul 18.00-21.00	Dinas PP, KB, PPPA
	2. Pengalokasian dana dalam keluarga untuk melakukan aktivitas bersama yang berkaitan dengan litersi melalui Arisan Buku	Dinas PP, KB, PPPA
	3. Fasilitasi penguatan ketatalaksanaan kebijakan strategis gerakan literasi keluarga	Balitbang
	4. Monitoring dan evaluasi kebijakan strategis gerakan literasi keluarga	Balitbang/Bappeda
XVII. Penguatan tatakelola pengembangan literasi di lingkungan masyarakat	1. Pengembangan integrasi kegiatan budaya dan literasi di Kab. LB	Dinas Porapar
	2. Penguatan komitmen pengalokasian dana desa untuk kegintan literasi	Dinas PMP
	3. Pengembangan pekon percontohan literasi	Dinas PMP
	4. Pengimbasan pekon literasi	
	5. Fasilitasi penguatan ketatalaksanaan kebijakan strategis gerakan literasi di masyarakat	Dinas PMP Balitbang
	6. Monitoring dan evaluasi kebijakan strategis gerakan literasi masyarakat	Balitbang/Bappeda

Untuk mengetahui secara rinci rencana aksi Kabupaten Literasi Kabupaten Lampung Barat 2019-2022, dapat dilihat pada matriks Rencana Aksi Kabupaten Literasi pada lampiran dokumen peta jalan ini.

OPD | KABAG HUKUM

3.3. Ukuran Keberhasilan Kabupaten Literasi

Untuk melihat keberhasilan upaya pencapaian sasaran Kabupaten Literasi, telah ditetapkan ukuran keberhasilan dengan indikator-indikator sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

Indikator Keberhasilan Kabupaten Literasi Per Ranah Literasi

No	RANAH	INDIKATOR	Satuan	Target 2022
1	SEKOLAH	1. Rata-rata nilai UN (SMP) per mata pelajaran;	Poin	
		a. Bahasa Indonesia		65,67
		b. Bahasa Inggris		49,90
		c. Matematika		49,83
		d. IPA		50,99
		2. Rata-rata nilai UN (SD) per mata pelajaran;	Poin	
		a. Bahasa Indonesia		73,29
		b. Matematika		73,48
		c. IPA		74,71
		3. Rata-rata skor UKG mata pelajaran UN (SMP);	Poin	75,58
		4. Jumlah judul buku yang diterbitkan (anak usia sekolah);	judul/kec	1
		5. Jumlah bahan bacaan non pelajaran yang dimiliki sekolah (dari judul buku diperpustakaan);	%	50
		6. Jumlah sekolah yang menyelenggarakan GLS	sekolah	266
		7. Jumlah peserta olimpiade matematika dan sains tingkat Nasional;	siswa	2
		8. Jumlah ketersediaan alat peraga matematika dan sains;	%	100
		9. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembelajaran literasi digital (SD);	sekolah	ada
		10. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembelajaran literasi digital (SMP);	%	100
		11. Rata-rata nilai USBN-PKN;	Poin	73,00
		12. Jumlah sekolah yang memiliki aktivitas seni budaya dan bahasa daerah (mulok, ekstrakulikuler).	sekolah	266
		13. Jumlah kegiatan literasi finansial (kegiatan kewirausahaan, bazar di sekolah);	sekolah	266

OPD | KABAG HUKUM

		14. Jumlah siswa dan guru yang menggunakan produk layanan tabungan dan koperasi/sekolah.	sekolah	266
		15. Jumlah ketersediaan akses internet di sekolah	%	40
		16. Jumlah ketersediaan akses internet di sekolah	Sekolah	150
2	KELUARGA	1. Meningkatnya budaya baca dan tulis di lingkungan keluarga;	%	35
		2. Penggunaan Bahasa daerah di lingkungan keluarga;	%	100
		3. Jumlah bahan bacaan literasi Bahasa, numerasi dan sains yang dimiliki setiap keluarga;	%	100
		4. Penurunan angka kemiskinan	%	12,00
		5. Indeks gini ratio (ketimpangan pengeluaran daerah)	Poin	0,26
		6. Penurunan angka kejahatan dan pelanggaran anak di bawah umur.	Kasus	1
3.	MASYARAKAT	1. Angka melek aksara;	%	100
		2. Jumlah penduduk Lampung Barat yang menguasai Bahasa dan seni budaya daerah masing-masing;	%	50
		3. Jumlah komunitas budaya /sanggar.	Sanggar	125
		4. Jumlah pengayaan bahan pustaka per tahun;	Buku	12.500
		5. Jumlah Kampung Literasi	Pekon	35
		6. Jumlah bahan bacaan literasi numerasi yang dimiliki setiap desa	Buku	250
		7. Jumlah program yang berkitan dengan lingkungan dalam suatu desa	Program	3
		8. Jumlah taman baca di masyarakat yang berbasis digital;	0	26
		9. Jumlah ketersediaan perangkat digital (komputer, *software*, internet) di setiap desa termasuk daerah 3T;	Desa	136
		10. Angka partisipasi dalam pemilu.	%	85,39
		11. Angka konflik antar etnis, ras dan agama di masyarakat;	Kasus	0
		12. Jumlah komunitas sains dalam suatu daerah;	Komunitas	15
		13. Jumlah komunitas kebudayaan.	Komunitas	100
		14. Jumlah Komunitas Literasi	Komunitas	100
		15. Pelaksanaan proses/aksi literasi menuju Anugrah Adiliterasi	Pengharga an	Anugerah Adi Literasi Tahun 2021

OPD | KABAG HUKUM

3.4. Area Perubahan Kabupaten Literasi

Untuk mewujudkan sasaran Kabupaten Literasi sebagaimana telah disebutkan di atas, ditetapkan area-area perubahan literasi di Kabupaten Lampung Barat. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup literasi diharapkan dapat menghasilkan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian Kabupaten Literasi. Area-area perubahan tersebut sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.

Area Perubahan Kabupaten Literasi 2019-2022

Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
1. SDM	• Meningkatnya pemahaman kepala sekolah, guru, dan komite pendidikan tentang konsep, cara implementasi, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pengembangan literasi siswa di lingkungan sekolah;
	• Meningkatnya pemahaman pegiat, tutor, pengelola perpustakaan umum/publik dan tempat-tempat bacaan masyarakat tentang konsep, cara implementasi, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pengembangan literasi di lingkungan masyarakat;
	• Meningkatnya pemahaman orang tua/wali murid tentang konsep dan cara implementasi aktivitas literasi di lingkungan.
2. Sumber Belajar	• Meningkatnya sumber belajar bermutu baik dari segi jumlah, ragam maupun bentuk yang memadai di lingkungan keluarga.
	• Meningkatnya sumber belajar bermutu baik dari segi jumlah, ragam maupun bentuk yang memadai di lingkungan sekolah.
	• Meningkatnya sumber belajar bermutu baik dari segi jumlah, ragam maupun bentuk yang memadai di lingkungan sekolah.
3. Akses	• Menguat dan meluasnya akses terhadap sumber belajar bermutu pada peserta belajar melalui berbagai aktivitas literasi dan sarana prasarana yang mendukung di lingkungan sekolah.

OPD | KABAG HUKUM

	• Menguat dan meluasnya akses terhadap sumber belajar bermutu pada peserta belajar melalui berbagai aktivitas literasi dan sarana prasarana yang mendukung di lingkungan masyarakat.
	• Menguat dan meluasnya akses terhadap sumber belajar bermutu pada peserta belajar melalui berbagai aktivitas literasi dan sarana prasarana yang mendukung di lingkungan keluarga.
4. Pelibatan Publik	• Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui komite sekolah dalam mengembangkan literasi di lingkungan sekolah;
	• Meningkatnya partisipasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, akademisi, pegiat pendidikan, pelaku seni dan budaya, media massa, serta tokoh masyarakat dalam mengembangkan literasi di lingkungan masyarakat; dan
	• Meningkatnya intensitas orang tua dalam mengembangkan pentingnya literasi di lingkungan keluarga.
5. Tata Kelola	• Menguatnya pengelolaan tentang kebijakan, sarana dan prasarana, anggaran, kegiatan, pengawasan, dan evaluasi terkait dengan pengembangan literasi di lingkungan sekolah;
	• Menguatnya pengelolaan tentang sarana prasarana dan kegiatan literasi di perpustakaan umum/publik dan tempat-tempat bacaan di lingkungan masyarakat;
	• Menguatnya pengelolaan sarana prasarana dan kegiatan literasi serta anggaran terkait pengembangan literasi di lingkungan keluarga.

3.5. Tata Kelola dan Daya Dukung Kabupaten Literasi

Pelaksanaan literasi tumbuh berdasarkan berbagai kegiatan literasi yang sudah dikelola unit-unit utama untuk memperkuat sinergi antarunit utama pelaku gerakan literasi dalam menetapkan kebijakan Kabupaten Literasi, menghimpun semua potensi, serta memperluas keterlibatan publik untuk menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

Pengorganisasian dan pengelolaan Kabupaten Literasi ini merupakan koordinasi seluruh pemangku kepentingan atau ekosistem pendidikan yang terkait dengan penyelenggaraan literasi. Seluruh pelaku membentuk jejaring dan kolaborasi secara terintegrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan Kabupaten Literasi.

Kabupaten Literasi memiliki prinsip berkesinambungan, terintegrasi, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Secara sederhana, Kabupaten Literasi ini adalah gerakan milik masyarakat Lampung Bara yang diimplementasikandi tiga ranah, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat melibatkan berbagai pelaksana dan pemangku kepentingan pendidikan berdasarkan kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing. Secara ringkasnya tata kelola Kabupaten Literasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

OPD

Gambar 3.1.

Tata Kelola Kabupaten Literasi

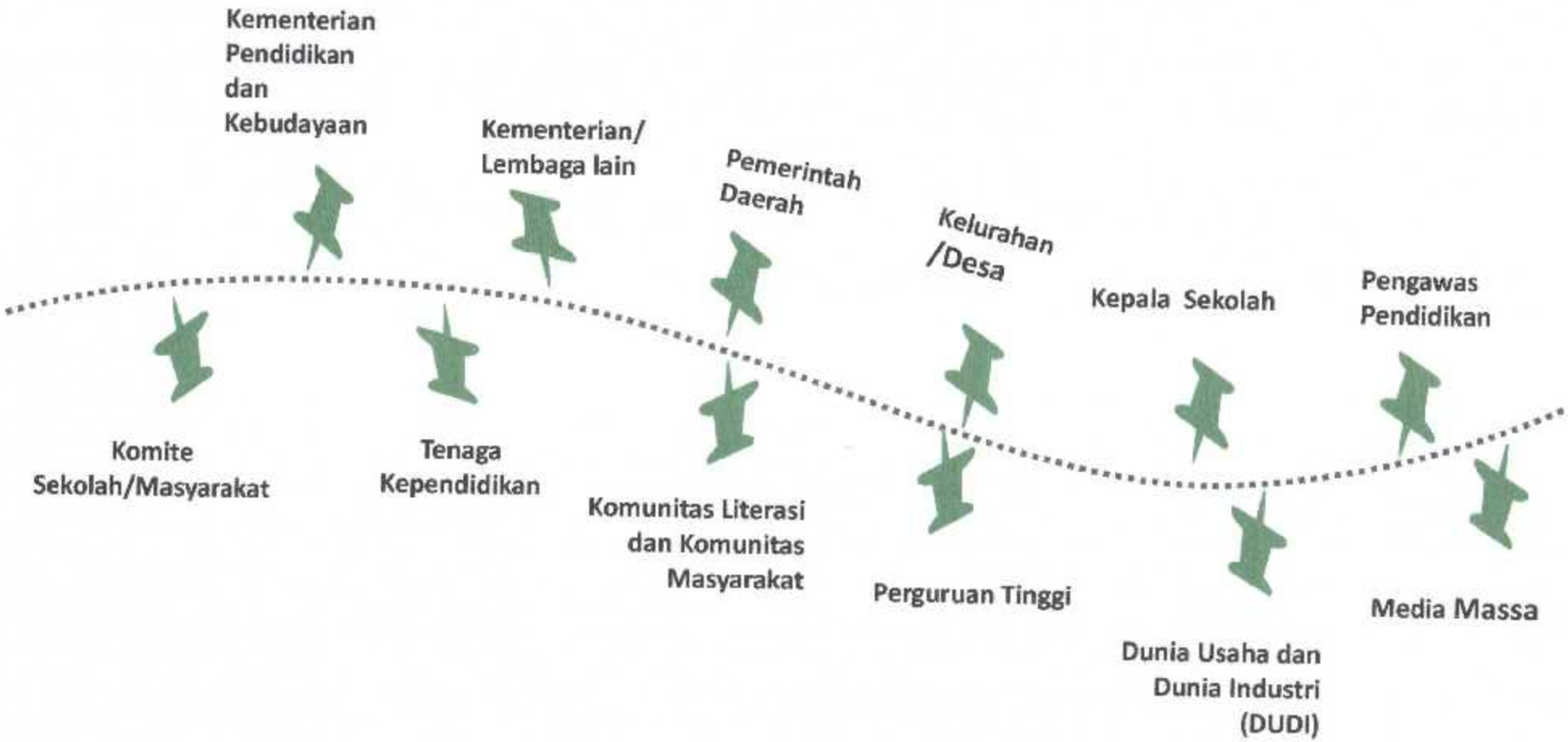

OPD | KABAG HUKUM

Sedangkan fungsi dan peranan masing-masing pihak dapat dideskripsikan sebagai berikut.

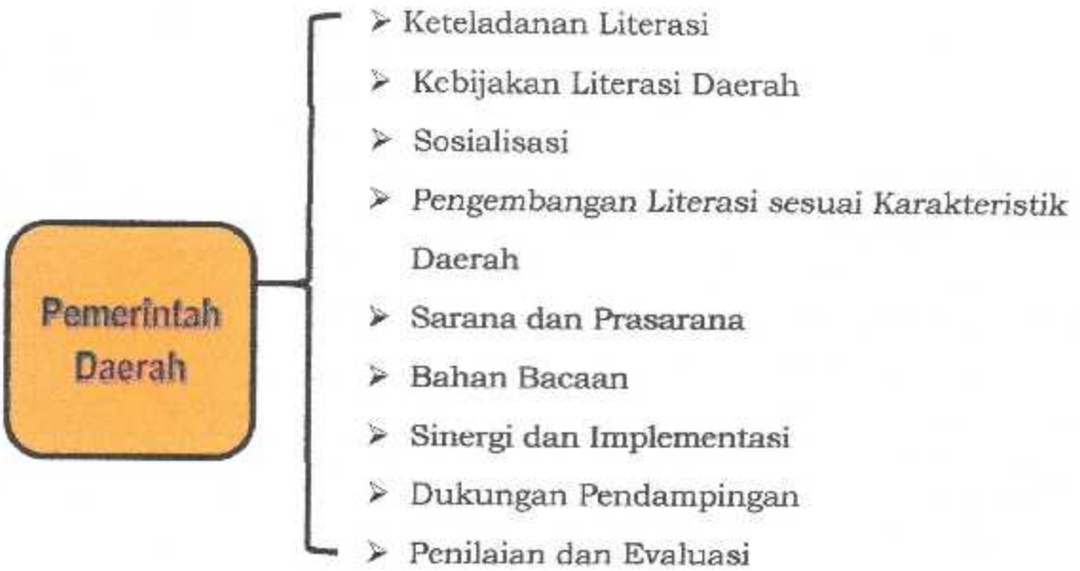



Keteladanan Literasi

Kebijakan Literasi Pekon

Sarana dan Prasarana

Sinergi dan Implementasi

Alokasi Dana Desa

OPD | KABAG HUKUM


Kepala Sekolah
Keteladanan Literasi
Kegiatan ekskul
Penyusunan Rencana Kegiatan Literasi
Budaya Sekolah
Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendampingan dan Implementasi
Menciptakan Relasi
Sarana dan Prasarana
Pengawasan dan Evaluasi
Tindak Lanjut
Dokumentasi
Pengawas Pendidik
Keteladanan Literasi
Identifikasi dan Optimalisasi Potensi
Praktik Implementasi
Pendampingan Literasi
Evaluasi
Pendampingan Hasil Evaluasi
Penjelasan Komprehensif Literasi
Memastikan Gerakan Literasi di Sekolah
Pengawasan

OPD

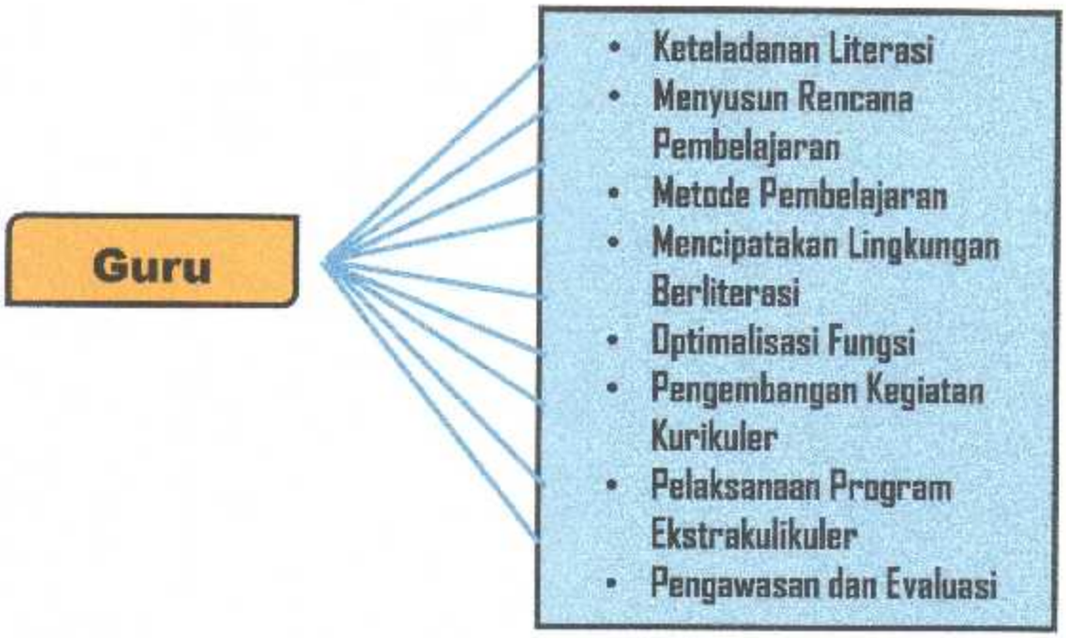



OPD | KABAG HUKUM

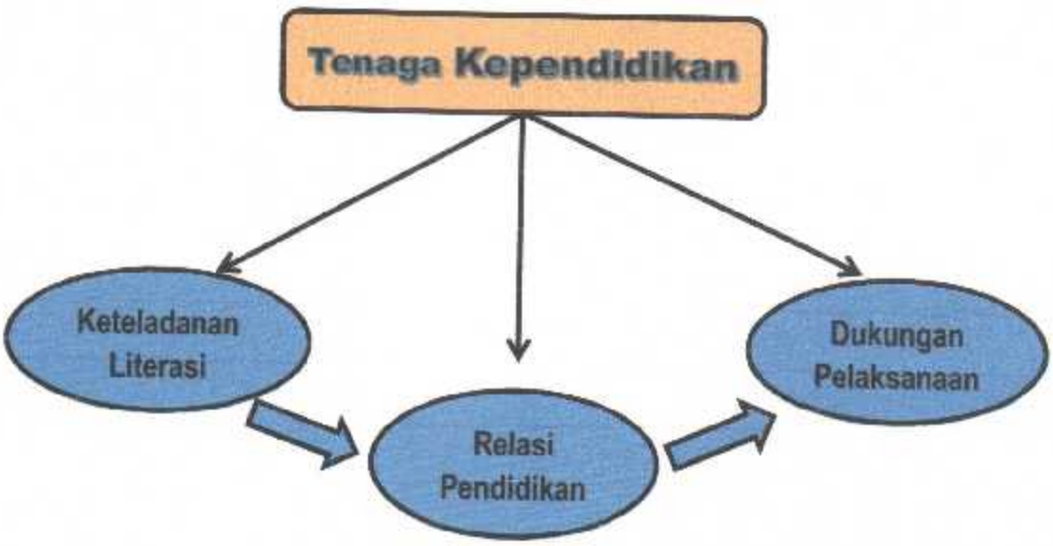



OPD | BAG HUKUM


Perguruan Tinggi
Peraturan dan Kebijakan
Keteladanan Literasi
Tri Darma Perguruan Tinggi
Dukungan Literasi
Menjalin Kerjasama


Dunia Usaha dan Industri
✓ Keteladanan Literasi
✓ Dukungan CSR
✓ Menjalin Mitra atau Relasi
✓ Memberikan Kesempatan
✓ Mengenal Dunia Kerja

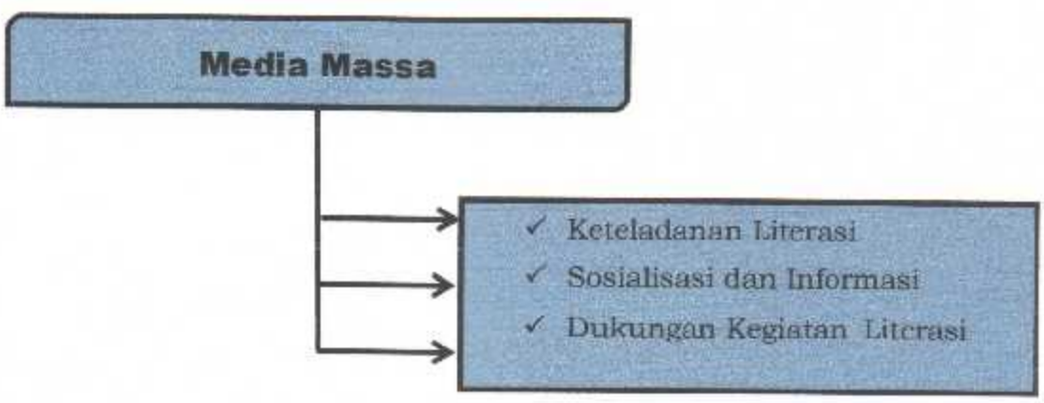
Media Massa
✓ Keteladanan Literasi
✓ Sosialisasi dan Informasi
✓ Dukungan Kegiatan Literasi

OPD

BAB 4

PENCAPAIAN DAN PELAKSANAAN STRATEGIS KABUPATEN LITERASI

4.1 Kemajuan Pelaksanaan Kabupaten Literasi



Literasi di Kabupaten Lampung Barat sesungguhnya bukan hal yang baru. Meskipun secara aklamasi dicanangkan sebagai Kabupaten Literasi baru setahun lebih (2 Mei 2018), namun secara pencapaian, pelaksanaan literasi sudah sangat beragam. Hal ini tidak lepas dari peran Tim Gerakan Literasi Daerah (GLD) Kabupaten Lampung Barat yang merupakan garda depan dalam melakukan aksi-aksi literasi di Kabupaten Lampung Barat tentunya bekerjasma dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan literasi seperti kampanye, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan literasi.

Adapun pencapaian pelaksanaan kabupaten literasi yang telah dilaksanakan selama setahun setelah dicanangkan sebagai Kabupaten Literasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

OPD | KABAG HUKUM

Tabel 4.1.

Pelaksanaan Kabupaten Literasi Tahun 2018

(Satu Tahun Pencapaian Kabupaten Literasi)

No	Kegiatan	Keterangan
1	Bupati Lampung Barat mengeluarkan payung hukum berupa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Gerakan Literasi Daerah Kabupatem Lampung Barat *(12 Maret 2018)*	
2	Lounching Lampung Barat Kabupaten Literasi (1-2 Mei 2018)	Rangkain acara: • Dikusi dan Sedekah Buku • Jambore Literasi se Lampung • Pemilihan Duta Literasi • Bazar Buku • Talkshow Literasi • Penyerahan Bantuan Mobil Perpus Keliling Oleh Perpusnas • Pencanangan Lambar sebagai Kabupaten Literasi (penyerahan simbol literasi kepada Relawan Bergerak Literasi Lambar, pembagian Perbup Literasi, launching buku *Sepotong Surga di Kaki Pesagi*, dan donasi buku)
3	Peluncuran Produk Literasi Berupa "Buku Sepotong Surga di Kaki Pesagi" , (2 Mei 2018)	Pelaksana: Pemkab Lambar, Forum Literasi Lampung Barat (FLLB) dan Pustaka Labrak, Buku "Sepotong Surga di Kaki Pesagi" adalah karya para pemenang dan terpilih dalam Lomba Menulis Pesona Lampung Barat yang di Laksanakan Forum Literasi Lampung Barat (FLLB)
4	Pembangunan 131 (seratus tiga puluh satu) Perpustakaan Pekon (Pojok Baca Pekon) oleh pemerintahan Pekon se Lambar.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
5	Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus mengeluarkan SK Pembentukan Tim Gerakan Literasi Daerah (GLD) Lampung Barat (*26 September 2018*).	Bagian Hukum, Setdakab
6	Peluncuran "Pekon Literasi" di Pekon Padang Tambak Way Tenong, (*26 September 2018*).	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemerintahan Masyarakat dan pekon dan Forum Literasi Lampung Barat

OPD | KABAG HUKUM

7	Pembangunan Taman Bacaan Masayarakat (TBM) "Lamban Baca Beguai Jejama" di Lambar.	Saat ini sudah terbangun 30 titik Lamban Baca Beguai Jejama yang tersebar dibeberapa Kecamatan (Way Tenong, Air Hitam, Gedung Surian, Sekincau, BNS, Suoh, Balik Bukit dan Pagar Dewa). Program masih berjalan dengan target kerja: terbangun nya Lamban Baca "Beguai Jejama" di Tingkat Pemangku (RT) se Lampung Barat. Program *Non APBD* ini hasil Kerjasama antara: Forum Literasi Lampung Barat, Yayasan Rebung Cendani dan TIM GLD.
8	Pembentukan dan pembinaa jejaring sosial literasi di Lampung Barat (Komunitas Literasi Penggiat Literasi, TBM dll.	TIM GLD
9	Agenda Sosialisasi, Pembinaa dan monitoring Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS)	TIM GLD
10	Pelaksanaan Even Literasi Menyambut Hari Ibu	Jenis Perlombaan • Lomba Paduan Suara "Mars Literasi • Lomba Mendongeng Pelaksana : TIM GLD dan PKK
11	Pelaksanaan "Senam Literasi" di Sekolah-sekolah di Lambar	TIM GLD
12	Penerbitan Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lambar Nomor 420/2272/III.01/XI/2018 Tentang Mengaktifkan Kembali "Gerakan Literasi Sekolah" (14 November 2018)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Program Kunjungan, Pembinaan dan Monitoring terhadap Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Pekon di Lambar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13	Pembuatan Portal Media Literasi www.literasilambar.com	Pelakasana: TIM GLD Website literasi: www.literasilambar.com diharapkan menjadi pusat informasi, publikasi dan edukasi terkait Pelaksanaan dan pengembangan Gerakan Literasi Daerah (GLD) Lampung Barat .

OPD | KABAG HUKUM

14	Pembangunan Pojok-pojok Baca di berbagai Gedung Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit-Puskesmas)	Dinas Kesehatan
15	Workshop penulisan dan peluncuran buku bertajuk "Satu Guru Satu Buku (Sagu Sabu)",.	Pelaksana; Pemkab Lambar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lambar dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Lambar Pelaksanaan Workshop: 7 – 8 April di Aula Sekincau Pemdakab Lampung Barat Peluncuran Buku: 2 Mei 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat pencapaian Kabupaten Literasi selama setahun ini telah banyak yang dilaksanakan. Hal tersebut merupakan capaian yng luar biasa dan patut diberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi baik melalui dana APBD maupun non APBD. Selanjutnya, kehadiran peta jalan Kabupaten Literasi ini nantinya menjadi pedoman bagi semua pihak untuk meningkatkan pencapaian Kabupaten Literasi dan melanjutkan pelaksanaan Kabupaten Literasi sampai tercapai target yang diharapkan kedepannya.

4.2 Pelaksanaan Strategis Kabupaten Literasi

Pelaksanaan Kabupaten Literasi secara strategis dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

4.2.1.Sasaran Strategis

Literasi memegang peranan yang strategis dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lampung Barat terutama dalam Misi Kedua yaitu Meningkatkan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas dan Berdaya Saing. Sasaran strategis dalam pelaksanaan Kabupaten Literasi di Kabupaten Lampung Barat, antara lain :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
2. Meningkatkan minat baca pelajar dan masyarakat;

OPD | KABAG HUKUM

3. Meningkatnya dukungan pemangku kepentingan/public berkapasitas dan terlibat aktif dalam mewujudkan Kabupaten Literasi sesuai dengan perannya masing-masing;
4. Memperkuat kelembagaan literasi di Kabupaten Lampung Barat.

4.2.2.Strategi Pelaksanaan Kabupaten Literasi

Agar pelaksanaan Kabupaten Literasi dapat memberikan manfaat yang optimal bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, maka perlu ada upaya-upaya khusus yang merupakan sebuah strategi untuk meningkatkan tingkat literasi di Kabupaten Lampung Barat. Strategi pelaksanaan Kabupaten Literasi di Kabupaten Lampung Barat yaitu antara lain :

1. Meningkatkan Kapasitas Fasilitator

Fasilitator literasi merupakan ujung tombak gerakan literasi yang membantu dan mendorong Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan. Pada ranah keluarga, fasilitator literasi terdiri atas orang tua dan atau anggota keluarga. Pada ranah sekolah, fasilitator literasi terdiri atas kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas, serta komite sekolah. Pada ranah masyarakat, fasilitator literasi terdiri atas pegiat literasi dan pengelola perpustakaan publik atau taman baca. Peran fasilitator literasi sangat strategis dalam meningkatkan budaya literasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fasilitator menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan.

OPD | KABAG HUKUM

A. Sasaran

1) Meningkatnya pemahaman kepala sekolah, guru, dan komite pendidikan tentang konsep, cara implementasi, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pengembangan literasi siswa di lingkungan sekolah;
2) Meningkatnya pemahaman pegiat, tutor, pengelola perpustakaan umum/publik dan tempat-tempat bacaan masyarakat tentang konsep, cara implementasi, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pengembangan literasi di lingkungan masyarakat; dan
3) Meningkatnya pemahaman orang tua/wali murid tentang konsep dan cara implementasi aktivitas literasi di lingkungan keluarga.

B. Kebijakan

1) Peningkatan kualitas SDM fasilitator literasi sekolah tentang konsep, cara implementasi, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi pengembangan literasi siswa di lingkungan sekolah
2) Peningkatan kualitas SDM fasilitator literasi keluarga tentang konsep, cara implementasi aktivitas literasi di lingkungan keluarga
3) Peningkatan kualitas SDM fasilitator literasi masyarakat tentang konsep, cara implementasi, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi pengembangan literasi di lingkungan masyarakat

C. Program

1) Peningkatan kualitas SDM fasilitator di sekolah
2) Peningkatan kualitas SDM fasilitator literasi di lingkungan keluarga
3) Peningkatan kualitas SDM fasilitator literasi di lingkungan masyarakat

D. Strategi Implemetasi

1) Pelatihan kepala sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan kabupaten literasi. Kepala sekolah diharapkan dapat merancang pengembangan literasi di sekolah,

OPD | KABAG HUKUM

mulai dari membuat kebijakan inovatif, mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk memberikan teladan yang baik dalam berliterasi, bersama guru membuat kegiatan sekolah yang penuh dengan kegiatan literasi yang menyenangkan, serta terus melakukan pengawasan dan evaluasi terkait dengan pengembangan literasi di sekolah;

2) Pelatihan guru dalam menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga dilatih untuk memilih, membuat, dan memodifikasi permasalahan schari-hari yang dapat digunakan di dalam pembelajaran literasi. Selain itu, guru juga dilatih untuk menerapkan berbagai strategi dalam pemberian tugas atau pekerjaan rumah yang dapat melibatkan anggota keluarga dalam literasi;
3) Pelatihan komite sekolah untuk memperkuat ekosistem pendidikan. Komite sekolah dapat mendorong budaya literasi di sekolah melalui pelibatan dan penguatan peran orang tua di keluarga dan masyarakat;
4) Forum diskusi literasi bagi warga sekolah. Forum diskusi ini dapat menjadi wahana bagi warga sekolah untuk menyampaikan gagasan, berbagi praktik baik dalam pelaksanaan literasi, dan refleksi terhadap berbagai kegiatan literasi yang dilakukan di sekolah;
5) Penguatan kapasitas pegiat, tutor, pengelola perpustakaan dalam implementasi, pengelolaan, dan evaluasi. Penggerak literasi di masyarakat perlu memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan perannya agar dapat menciptakan inovasi dalam berbagai aktivitas literasi yang dilakukan; dan

OPD | KABAG HUKUM

6) Penyuluhan literasi kepada orang tua/wali murid. Kesadaran orang tua/wali murid tentang pentingnya literasi dapat menjadi faktor utama dalam menumbuhkembangkan budaya literasi dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pembiasaan berliterasi bagi anak-anaknya.

2. Meningkatkan Jumlah dan Ragam Sumber Belajar Bermutu

Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu menjadi syarat penting ketika kebijakan literasi dilaksanakan. Hingga saat ini, sumber belajar bermutu yang berupa bahan bacaan masih kurang, baik dari segi jumlah, subjek dan jenis bacaan, maupun kualitas bacaan. Bahan bacaan yang tersedia tidak banyak pilihan, monoton pada tema-tema tertentu saja, dan tidak sesuai pula dengan jenjang kebutuhan pembaca. Sumber belajar yang berkualitas dan memadai masih dipandang kurang mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan bahan bacaan literasi dalam bentuk digital merupakan pilihan yang tepat. Sumber belajar yang kaya dan beragam memberikan keleluasaan bagi pelaku literasi untuk mengakses, memanfaatkan, dan mengembangkan kegiatan literasi.

A. Sasaran

1) Meningkatnya sumber belajar bermutu baik dari segi jumlah, ragam maupun bentuk yang memadai di lingkungan keluarga.
2) Meningkatnya sumber belajar bermutu baik dari segi jumlah, ragam maupun bentuk yang memadai di lingkungan sekolah.
3) Meningkatnya sumber belajar bermutu baik dari segi jumlah, ragam maupun bentuk yang memadai di lingkungan sekolah.

OPD | KABAG HUKUM

B. Kebijakan

1) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung gerakan literasi di sekolah
2) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung gerakan literasi di lingkungan keluarga
3) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung gerakan literasi di lingkungan masyarakat

C. Program

1) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung gerakan literasi
2) Peningkatan sarpras untuk mendukung kegiatan perpustakaan
3) Program PAUD
4) Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar pendukung gerakan literasi keluarga
5) Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar pendukung gerakan literasi masyarakat
6) Perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar

D. Strategi Implementasi

1) Penyusunan dan penyediaan bahan bacaan literasi yang bermutu dengan menyesuaikan usia pembaca, terutama kesesuaian isi, jumlah halaman, pilihan kata, kalimat, dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Bahan bacaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembaca sangat berpengaruh terhadap kelangsungan budaya baca sebagai pintu masuk dari berbagai literasi;
2) Pengembangan bahan bacaan berbasis digital. Bahan bacaan digital lebih diminati oleh banyak orang karena dapat memberikan berbagai macam pilihan bacaan dalam satu media dan kemudahan akses yang tidak terbatas waktu;

OPD | KABAG HUKUM

3) Pembuatan laman yang berisi tentang konten literasi, bentuk kegiatan literasi yang aplikatif, serta situs-situs literasi yang menyenangkan. Laman literasi ini bertujuan untuk memberikan pilihan pada keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencari referensi tepercaya;
4) Penyelenggaraan donasi buku daring. Donasi buku daring ini dapat diakses melalui laman donasibuku.kemdikbud.go.id. Donasi buku daring merupakan sarana untuk mempertemukan pegiat TBM dengan masyarakat luas dan para donatur yang dapat berkontribusi membantu dan menyukseskan gerakan literasi di masyarakat;
5) Pengoptimalan sumber belajar yang ada di masyarakat, seperti museum, gedung kesenian, perpustakaan daerah, cagar budaya, dan tempat bersejarah. Strategi ini berdampak positif bagi pembiasaan literasi, pengenalan terhadap lingkungan sekitar, dan peningkatan angka kunjungan ke tempat-tempat bersejarah dan cagar budaya; dan
6) Penerjemahan bahan penunjang literasi. Bahan-bahan penunjang literasi yang menarik dan menyenangkan sebagian besar masih berbahasa asing sehingga perlu diterjemahkan agar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

3. Perluasan Akses Sumber Belajar Bermutu dan Cakupan Peserta Belajar

Selain ketersediaan sumber belajar, keberhasilan kegiatan literasi pun perlu didukung dengan adanya kemudahan untuk mengakses sumber belajar tersebut. Agar masyarakat dapat menjangkau sumber-sumber belajar dengan mudah, perlu ada sarana dan prasarana yang mendukung, seperti layanan taman bacaan dan pojok baca di tempat umum. Kemudahan akses terhadap sumber belajar berkorelasi dengan perluasan cakupan peserta belajar. Semakin banyak sumber

OPD | KABAG HUKUM

pembelajaran literasi yang mudah diakses oleh masyarakat, semakin meningkat pula ketertarikan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan literasi.

A. Sasaran

1) Menguat dan meluasnya akses terhadap sumber belajar bermutu pada peserta belajar melalui berbagai aktivitas literasi dan sarana prasarana yang mendukung di lingkungan sekolah.
2) Menguat dan meluasnya akses terhadap sumber belajar bermutu pada peserta belajar melalui berbagai aktivitas literasi dan sarana prasarana yang mendukung di lingkungan masyarakat.
3) Menguat dan meluasnya akses terhadap sumber belajar bermutu pada peserta belajar melalui berbagai aktivitas literasi dan sarana prasarana yang mendukung di lingkungan keluarga.

B. Kebijakan

1) Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber literasi dan perluasan cakupan peserta literasi di sekolah
2) Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber literasi dan perluasan cakupan peserta literasi di lingkungan keluarga
3) Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber literasi dan perluasan cakupan peserta literasi di lingkungan masyarakat

C. Program

1) Perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar
2) Perluasan akses sumber dan perluasan cakupan peserta literasi keluarga
3) Perluasan akses sumber dan perluasan cakupan peserta literasi masyarakat

OPD | KABAG HUKUM

D. Strategi Implementasi

1) Pelaksanaan berbagai kegiatan literasi oleh siswa berdasarkan prinsip keteladanan dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan atau sebaliknya;
2) Pembentukan komunitas/kelompok literasi di lingkungan sekolah yang menjadi wadah bagi seluruh warga sekolah untuk terlibat dalam kegiatan literasi;
3) Pelaksanaan berbagai kegiatan literasi untuk seluruh kalangan masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas publik sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan terlibat dalam kegiatan ini;
4) Pelaksanaan berbagai kegiatan literasi di lingkungan keluarga berdasarkan prinsip keteladanan oleh anak dan orang tua;
5) Program pengimbasan literasi di sekolah dan masyarakat untuk dapat memberikan pengaruh positif bagi sekolah dan komunitas di sekitarnya dalam pengembangan budaya literasi;
6) Kampanye literasi di ruang publik. Kegiatan ini merupakan usaha menyebarluaskan pengaruh positif untuk menumbuhkan minat dan kesadaran masyarakat terhadap literasi;
7) Penyelenggaraan *open house* oleh sekolah dan komunitas yang mengembangkan literasi untuk berbagi inspirasi kepada sekolah dan komunitas lain agar dapat belajar secara langsung tentang pengelolaan kegiatan literasi yang dilakukan; dan
8) Pengondisian dan pemanfaatan fasilitas publik dan fasilitas di rumah yang kaya literasi untuk meningkatkan kesadaran berliterasi melalui hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti tersedianya bahan bacaan di tempat-tempat umum dan tampilan-tampilan yang mengandung unsur literasi.

OPD | KABAG HUKUM

4. Meningkatkan Pelibatan Publik

Kesuksesan gerakan literasi membutuhkan partisipasi aktif semua pihak. Pelaksanaan gerakan literasi di semua satuan pendidikan melibatkan semua pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pada lingkup eksternal Kemendikbud, pihak-pihak yang dapat terlibat adalah perguruan tinggi, Perpusnas, Ikapi, lembaga donor, dan lain-lain. Gerakan Literasi Nasioanal juga memerlukan keterlibatan unsur masyarakat, seperti lembaga masyarakat di bidang pendidikan, perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, dan para tokoh masyarakat. Selain itu, dunia industry pun dapat dilibatkan dalam gerakan ini melalui pengimplementasian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Kesuksesan Gerakan Literasi Nasional dapat dicapai apabila tiap-tiap pemangku kepentingan memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan program literasi sesuai dengan perannya masing-masing.

A. Sasaran

1) Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui komite sekolah dalam mengembangkan literasi di lingkungan sekolah;
2) Meningkatnya partisipasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, akademisi, pegiat pendidikan, pelaku seni dan budaya, media massa, serta tokoh masyarakat dalam mengembangkan literasi di lingkungan masyarakat; dan
3) Meningkatnya intensitas orang tua dalam mengembangkan pentingnya literasi di lingkungan keluarga.

B. Kebijakan

1) Peningkatan keterlibatan semua pemangku literasi dalam mendukung gerakan literasi di sekolah

OPD | KABAG HUKUM

2) Peningkatan keterlibatan semua pemangku literasi dalam mendukung gerakan literasi di lingkungan keluarga
3) Peningkatan keterlibatan semua pemangku literasi dalam mendukung gerakan literasi di lingkungan masyarakat

C. Program

1) Peningkatan pelibatan publik untuk pengembangan literasi sekolah
2) Peningkatan pelibatan publik untuk pengembangan literasi di lingkungan keluarga
3) Peningkatan pelibatan publik untuk pengembangan literasi di lingkungan masyarakat

D. Strategi Implementasi

1) Pelibatan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, serta media massa agar dapat terlibat dalam mengembangkan literasi di sekolah atau di masyarakat (mencetak dan mengirimkan buku, memberikan layanan pengiriman buku, pendanaan dan kampanye literasi, membuat fasilitas penunjang literasi, dll.);
2) Pertemuan rutin orang tua/wali murid dengan pihak sekolah untuk membicarakan pengembangan literasi;
3) Penyelenggaraan festival literasi. Di dalam kegiatan festival banyak pihak yang dapat dilibatkan, seperti sekolah, lembaga pemerintahan, dunia industri, pegiat literasi, dan masyarakat dari seluruh kalangan; dan
4) Pelibatan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan literasi. Perguruan tinggi dapat terlibat untuk mengembangkan gerakan literasi melalui penelitian-penelitian, baik dari segi kegiatan maupun sumber belajar yang digunakan.

OPD | KABAG HUKUM

5. Penguatan Tata Kelola

Mekanisme pengelolaan ekosistem pada ranah sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi salah satu strategi penopang kesuksesan GLN. Penguatan tata kelola yang dilakukan oleh pelaku literasi di berbagai ranah merupakan bentuk komitmen dan keseriusan semua pihak untuk mewujudkan kesuksesan gerakan ini.

A. Sasaran

1) Menguatnya pengelolaan tentang kebijakan, sarana dan prasarana, anggaran, kegiatan, pengawasan, dan evaluasi terkait dengan pengembangan literasi di lingkungan sekolah;
2) Menguatnya pengelolaan tentang sarana prasarana dan kegiatan literasi di perpustakaan umum/publik dan tempattempat bacaan di lingkungan masyarakat; dan
3) Menguatnya pengelolaan sarana prasarana dan kegiatan literasi serta anggaran terkait pengembangan literasi di lingkungan keluarga.

B. Kebijakan

1) Peningkatan kolaborasi dan sinergi pengelolaan gerakan literasi di sekolah

C. Program

1) Penguatan tatakelola pengembangan literasi di sekolah

D. Strategi Implementasi

1) Pengumpulan dan penyebarluasan praktik baik tentang pengelolaan kebijakan, sarana prasarana, anggaran, kegiatan, pengawasan, dan evaluasi literasi di sekolah.

OPD | KABAG HUKUM

2) Pengumpulan dan penyebarluasan praktik baik tentang pengelolaan kebijakan, sarana prasarana, anggaran, kegiatan, pengawasan, dan evaluasi literasi pada pemerintah daerah, perpustakaan publik, taman bacaan masyarakat, dll.;
3) Pengumpulan dan penyebarluasan praktik baik tentang pengelolaan kegiatan, perpustakaan, dan anggaran khusus literasi di keluarga;
4) Alokasi waktu dan dana untuk pengembangan literasi serta kebijakan yang mendukung gerakan literasi. Alokasi waktu, dana, dan kebijakan menjadi sebuah bentuk prioritas dan komitmen pelaku literasi dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan gerakan literasi; dan
5) Penguatan kerja sama antarpusat belajar di masyarakat. Tujuan besar gerakan literasi tidak akan terwujud tanpa sinergi dan kolaborasi dari semua pihak baik. Oleh karena itu, penguatan kerja sama sangat penting dilakukan dengan berbagai pihak di semua ranah agar tujuan gerakan literasi semakin cepat tercapai.

OPD | KABAG HUKUM

BAB 5

MANAJEMEN PELAKSANAAN KABUPATEN LITERASI

5.1. Pengorganisasian

Literasi dapat dilaksanakan apabila ada pengelolanya. Agar pelaksanaan kabupaten literasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim untuk melakukan pengelolaan kabupaten literasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Berdasarkan salah satu prinsip literasi yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan maka organisasi pelaksana Kabupaten Literasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/380/KPTS/IV.03/2019 tentang Tim Koordinasi Kabupaten Literasi terdiri dari banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan organisasi non pemerintah yang disusun menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut :

A.	Pengarah	: 1. Bupati Lampung Barat
		2. Wakil Bupati Lampung Barat
B.	Pembina	: Sekretaris Daerah
C.	Ketua	: Asisten Bidang Ekbang
D.	Wakil Ketua	: Kepala Bappeda
E.	Sekretaris	: Kepala Balitbang



OPD | KABAG HUKUM

F. Koordinator Gerakan Literasi Sekolah : Kepala Disdikbud

G. Koordinator Gerakan Literasi Masyarakat : Kepala Dinas Perpus dan Kearsipan

H. Koordinator Gerakan Literasi Keluarga : Kepala Dinas PP, KB, PP dan PA

I. Tim Ahli : Tenaga Ahli Kelitbangan

J. Anggota :
1. Staf Ahli Bupati
2. Asisten Bid. Pemthn dan Kesra
3. Asisten Bidang Administrasi Umum
4. Kepala Dinas PMP
5. Kepala Dinas Kominfo
6. Kepala Dinas Pora dan Pariwisata
7. Kepala Dinas KUMKM, Perindag
8. Kepala Dinas Sosial
9. Kepala Dinas Kesehatan
10. Bagian Pemerintahan dan Otda
11. Bagian Hukum Setdakab
12. Bagian Perekonomian dan SDA
13. Bagian Administrasi Pembangunan
14. Bagian Organisasi Setdakab
15. Bagian Humas dan Protokol
16. Kepala Badan Pusat Statistik
17. Ketua Penggerak Tim Gerakan Literasi Daerah

Adapun tim koordinasi kabupaten literasi tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan fasilitasi kebijakan terhadap pelaksanaan kabupaten literasi;

OPD | KABAG HUKUM

2. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kabupaten literasi; dan
3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian program dan kegiatan kabupaten literasi

5.2. Monitoring dan Evaluasi

Kabupaten Literasi sebagai sebuah program bersama perlu dinilai dan dievaluasi demi perbaikan dan apresiasi bagi penguatan dan dukungan atas keberhasilan tiap-tiap pihak dalam mendukung Kabupaten Literasi. Oleh karena itu perlu dibuat pedoman monitoring dan evaluasi sehingga bisa menjadi alat bagi setiap pelaku literasi untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan literasi di tiap-tiap bidang sehingga diperoleh informasi tentang tingkat keberhasilan dan keterlaksanaan literasi di tiap-tiap ranah sesuai dengan indicator-indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, pedoman tersebut sebagai berikut :

a. Prinsip-Prinsip

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, prinsip-prinsip yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Objektif

   Prinsip objektif mengacu pada kriteria bahwa apa yang dinilai dan dievaluasi harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ada, yang dialami, sesuai dengan kriteria dalam indikator yang telah ditentukan. Fokus penilaian dan evaluasi adalah kesesuaian antara fakta dengan kriteria indikator yang telah ditetapkan.

2. Berkesinambungan

   Penilaian dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pada setiap tahapan kegiatan dan program terdapat mekanisme umpan balik yang berguna bagi perbaikan GLN ke depan.

OPD | KA... HUKUM

3. Menyeluruh (komprehensif)

   Penilaian dan evaluasi menyeluruh berarti bahwa indikatorindikator yang dinilai merupakan komponen-komponen yang merupakan representasi ideal implementasi gerakan literasi di tiap ranah.

4. Akuntabel

   Prinsip akuntabel mengacu pada kesediaan para pelaku Kabupaten Literasi untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan programnya kepada masyarakat luas (publik) sehingga dukungan dari masyarakat terhadap Kabupaten Literasi menjadi semakin kuat.

5. Perbaikan

   Hasil penilaian dan evaluasi yang dilakukan menjadi titik pijak Kabupaten Literasi, menjadi bahan masukan bagi perbaikan-perbaikan tahap selanjutnya, serta menjadi dasar bagi perencanaan program yang akan datang.

b. Metode

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mempergunakan berbagai macam metode yang relevan dan cocok untuk menilai keberhasilan Kabupaten Literasi. Beberapa metode yang dipergunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut.

1. Observasi (pengamatan)

   Dalam proses penilaian dan evaluasi, penilai melakukan kunjungan situs, mengadakan pengamatan, dan mencatat fakta-fakta sebagaimana adanya.

2. Dokumentasi

   Penilaian dan evaluasi dapat dilakukan dengan menilai dan mengevaluasi berbagai macam dokumentasi yang bisa menjadi instrumen untuk menentukan penilaian. Dokumentasi ini bias berupa portofolio, foto kegiatan, video, dan laporan-laporan kegiatan serta dokumen lain yang relevan.

OPD | KABAG HUKUM

3. Wawancara dengan pemangku kepentingan

   Dalam mengadakan penilaian dan evaluasi, penilai melakukan wawancara dengan pelaku dan pemangku kepentingan pendidikan yang relevan untuk menemukan dan memahami lebih dekat implementasi GLN di tiap-tiap ranah.

4. Kuesioner

   Penilai bisa memberikan kuesioner yang akan diisi oleh pelaku GLN agar dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh tentang bagaimana GLN diimplementasikan di tiap-tiap ranah.

5. Riset terfokus dan studi etnografis

   Penilai melakukan studi terfokus dengan membuat semacam riset tentang tema-tema atau praktik-praktik GLN yang sudah ada, membahas, dan menilainya sehingga hasil riset itu bisa menjadi sumber rujukan pembelajaran atau duplikasi praktik baik. Penilai juga bisa melakukan proses penilaian dengan mempergunakan studi etnografis dengan membuat narasi dan cerita tentang apa yang dilihat dan dialami dalam sebuah lingkungan literasi, baik itu di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat.

6. Telaah data sekunder dari berbagai macam lembaga yang relevan GLN mempergunakan data-data sekunder untuk mengukur tingkat literasi nasional, misalnya, data-data PISA, PIRLS, TIMMS, BPS, Ujian Nasional, dan lain-lain.

c. Unsur-unsur yang terlibat

   Unsur-unsur yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi Kabupaten Literasi merupakan unsur unsur yang dipilih sesuai dengan relevansi tugas dan tanggung jawab mereka dalam menilai dan mengevaluasi implementasi program-program Kabupaten Literasi di setiap ranah Pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan literasi di setiap ranah, seperti dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, komunitas sekolah (kepala sekolah dan guru), komite

OPD | KABAG HUKUM

sekolah, lembaga-lembaga pemerintahan, dan organisasi masyarakat sipil yang bergiat dibidang literasi.

d. Fokus

Fokus penilaian dan evaluasi dilakukan melalui tiga ranah literasi yaitu:

1. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

   Gerakan Literasi Sekolah merupakan keseluruhan kegiatan literasi yang terjadi di unit pendidikan terkecil, yaitu tingkat sekolah. Tingkat ini umumnya dipahami sebagai saat di mana peserta didik mulai memasuki pintu gerbang sekolah sampai ia menyelesaikan kegiatan di sekolah.

2. Gerakan Literasi Keluarga (GLK)

   Gerakan Literasi Keluarga merupakan keseluruhan kegiatan literasi yang terjadi di dalam keluarga-keluarga di Indonesia, baik itu yang dilakukan di rumah maupun yang terjadi di lingkungan masyarakat.

3. Gerakan Literasi Masyarakat (GLM)

   Gerakan Literasi Masyarakat adalah kegiatan literasi di masyarakat yang melibatkan berbagai macam pelaku tanpa memandang usia.

e. Komponen Literasi

Kabupaten Literasi dinilai dan dievaluasi berdasarkan komponen-komponen yang relevan yang sudah dipetakan dalam tiap-tiap ranah literasi. Tiap-tiap komponen terdiri atas lima strategi pendekatan yaitu:

1. penguatan kapasitas
2. peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar
3. perluasan akses
4. penguatan pelibatan public
5. penguatan tata kelola.

OPD | KABAG HUKUM

Kelima strategi ini terdapat dalam komponen penilaian di tiap-tiap ranah.Tiap-tiap komponen ini kemudian dibagi menjadi indikator-indikator keberhasilan yang sifatnya konkret dan dapat dinilai dan dievaluasi.

Monitoring pelaksanaan kabupaten literasi Kabupaten Lampung Barat dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja pada pemerintah daerah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam peta jalan kabupaten literasi Kabupaten Lampung Barat dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan literasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Pada lingkup unit/satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut :

1. Pertemuan rutin dengan tim koordinasi kabupaten literasi dalam rangka membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
2. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan ;
3. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduanmasyarakat;
4. Pengukuran target-target kegiatan kabupaten literasi sebagaimana diuraikan dalam peta jalan dengan realisasinya;
5. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan kabupaten literasi, yang dikoordinasikan pada lingkup yang lebih besar.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kabupaten literasi di Kabupaten Lampung Barat dilakukan dalam rentang waktu tertentu (per tahun). Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan kabupaten literasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring sebagai bahan pengambilan keputusan yang dilakukan pada saat

OPD | KABAG HUKUM

pelaksanaan kegiatan. Beberapa sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- Hasil-hasil monitoring;
- Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam peta jalan dengan realisasinya;

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan kabupaten literasi di tahun-tahun berikutnya.

OPD | KABAG HUKUM

GERAKAN LITERASI SEKOLAH							
No	Komponen	Indikator Keberhasilan	0	1	2	3	4
1.	Penilaian awal	Sekolah mengidentifikasi sumber-sumber belajar (buku pelajaran, buku nonpelajaran, lembar kerja, audiovisual, dll.) dan sarana prasarana (komputer, jaringan Internet, proyektor, alat peraga, perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, ruang praktik kesenian, taman, pojok baca, dll.) di dalam sekolah.					
		Sekolah mengidentifikasi sumber daya manusia untuk literasi (narasumber dari orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh agama, instansi pemerintah, perguruan tinggi, sekolah lain, DUDI, budayawan, pegiat seni, pegiat literasi, dll.) dan sarana prasarana (museum, sanggar, perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, kantor pemerintah, perguruan tinggi, sekolah lain, lapangan olahraga untuk publik, GOR, lahan pertanian, dll.) di luar sekolah					
		Sekolah mengidentifikasi sumber daya manusia yang memahami GLS, baik dari unsur internal sekolah (yayasan, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya)					
		Sekolah mengidentifikasi potensi budaya sekolah yang terkait dengan GLS.					
		Sekolah mengidentifikasi sumber-sumber (penggalian dana) untuk pengembangan GLS (misalnya: sumbangan alumni, CSR, dll.).					
		Sekolah mengidentifikasi tata kelola sekolah.					
2	Sosialisasi GLS kepada para pemangku kepentingan pendidikan	Sekolah melakukan sosialisasi GLS kepada para pemangku kepentingan pendidikan (guru, peserta didik, komite sekolah, orang tua/wali peserta didik, pengawas sekolah, dinas pendidikan setempat, dan masyarakat lainnya).					
		Perumusan kegiatan prioritas untuk mengembangkan literasi di sekolah melibatkan pemangku kepentingan pendidikan (guru/tenaga kependidikan, peserta didik, komite sekolah, orang tua/ wali peserta didik, pengawas sekolah, dinas pendidikan setempat, dan masyarakat)					

OPD | KABAG HUKUM

Tabel 5.1.
Penilaian dan Indikator Keberhasilan
Gerakan Literasi Sekolah

OPD | KABAG HUKUM

No	Komponen	Indikator Keberhasilan	0	1	2	3	4
3	Desain kebijakan GLS	Sekolah membentuk tim pelaksana GLS Peraturan sekolah mendukung implementasi GLS (kebijakan tentang wajib membaca sejumlah buku dalam rentang waktu tertentu, wajib mengunjungi perpustakaan, memperbaharui buku di perpustakaan atau pojok baca dalam rentang waktutertentu, dll.).					
4	Desainkegiatan GLS	Sekolah mengembangkan kegiatan GLS melalui enam dimensi literasi secara seimbang.					
		Sekolah menggunakan potensi lingkungan (fisik, sosial, dan budaya) untuk memperkaya pengalaman belajar siswa sehingga memiliki wawasan yang lebihluas.					
		Sekolah memiliki kegiatan unggulan dengan mengintegrasikan enam dimensi literasi dalam aktivitas pembelajaran.					
		Sekolah memiliki kegiatan unggulan GLS berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat.					
		Sekolah memiliki kegiatan literasi dan memfasilitasi peserta didik untuk melakukan kegiatansosialyangberkaitandengan literasi.					
5	Pengembangan GLS berbasis Pembelajaran	Guru mengintegrasikan kegiatan literasi yang tecermin dalam komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), antara lain, materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan metode penilaian yang relevan.					
		Guru mengajar dengan mengaitkan isi materi pembelajaran secara kontekstual dengan aspek kehidupan sehari-hari, kearifan lokal, dan kegiatanliterasi didalampraktik pembelajaran.					
		Guru melaksakanan praktik pembelajaran dengan menggunakan metode yang relevan, menarik, dan dapat memperkuat penanaman kemampuan enam literasi peserta didik.					
		Sekolah mengembangkan kapasitas guru dalam pembelajaran secara berkelanjutan, antara lain, melalui pelatihan, *lesson studies*, berbagi praktik baik, dan lain-lain.					
No.	**Komponen**	**Indikator Keberhasilan**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**



6	Pengembangan GLN berbasis budaya sekolah	Sekolah memiliki dan mengembangkan tradisi- tradisi unggulan atau kegiatan pembiasaan yang meningkatkan budaya literasi sekolah.					
		Sekolah mengidentifikasi dan mengembangkan kearifan lokal untuk meningkatkan budaya literasi sekolah					
		Sekolah memiliki dan mengembangkan komunitas literasi untuk meningkatkan budaya literasi sekolah.					
		Warga sekolah (peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah) memiliki sikap yang mencerminkan budaya literasi.					
		Warga sekolah (peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah) memiliki sikap keteladanan dalam berliterasi baca tulis.					
		Warga sekolah (peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah) memiliki sikap keteladanan dalam berliterasi numerasi.					
		Warga sekolah (peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah) memiliki sikap keteladanan dalam berliterasi sains.					
		Warga sekolah (peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah) memiliki sikap keteladanan dalam berliterasi digital.					
		Warga sekolah (peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah) memiliki sikap keteladanan dalam berliterasi finansial					
		Warga sekolah (peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah) memiliki sikap keteladanan dalam berliterasi budaya dan kewargaan.					
7	Pengembangan GLS berbasis masyarakat	Sekolah mengembangkan kapasitas orang tua untuk mendukung implementasi GLS.					
		Komite sekolah berperan aktif dalam mendukung kegiatan GLS.					
		Terdapat pelibatan masyarakat dalam GLS (orang tua, komite sekolah, alumni, tokoh masyarakat, lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang relevan, DUDI, serta perguruan tinggi).					

OPD | KABAG HUKUM

No.	Komponen	Indikator Keberhasilan	0	1	2	3	4
		Sekolah memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran di luar lingkungan sekolah (misalnya, museum, sanggar seni, puskesmas, tempat ibadah, sarana olahraga, dan lain-lain) secara efektif.					
		Sekolah menggali sumbangan dari masyarakat (orang tua, alumni, DUDI, dan lain-lain) untuk GLS.					
		Masyarakat (misalnya, orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang relevan) memberikan masukan, saran, kritik, dan/atau inspirasi dalam GLS yang berkelanjutan.					
8	Implementasi enam dimensi literasi	Sekolah memiliki bahan bacaan dan kegiatan yang mengembangkan literasi baca-tulis (membaca sejumlah buku dalam waktu tertentu, menuliskan hal-hal menarik dari buku yang dibaca, membuat kelompok diskusi buku, membuat perpustakaan di kelas, mengundang orang tua, sastrawan, atau pegiat literasi untuk membacakan buku di sekolah, dan lain-lain).					
		Sekolah memiliki bahan bacaan dan kegiatan yang mengembangkan literasi numerasi (proyek-proyek numerasi sederhana di dalam kelas, membuat penelitian sederhana bersama teman di kelompok numerasi siswa, mengunjungi dan mencari informasi penggunaan angka, simbol matematika, grafik, tabel, bagan di lingkungan sekitar sekolah, dan lain-lain).					
		Sekolah memiliki bahan bacaan dan kegiatan yang mengembangkan literasi sains (menanam, merawat, mengamati, mencatat, dan mempresentasikan pertumbuhan tanaman; melakukan kunjungan ke pasar untuk mengamati dan menuliskan barang-barang yang dijual berdasarkan jenisnya; dan lain-lain).					
		Sekolah memiliki kegiatan atau aktivitas yang mengembangkan literasi finansial (membiasakan siswa berbelanja di koperasi sekolah; memberikan pelatihan literasi finansial kepada siswa dalam memahami pentingnya menabung, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, mengenali metode pembayaran yang tersedia di pasar, baik tunai, kredit, maupun debit; menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan tingkat dasar dengan cara yang menyenangkan dan interaktif melalui gawai; menyelenggarakan pekan kewirausahaan dengan melatih siswa berjualan barang atau jasa; menggunakan KIP untuk berbelanja kebutuhan sekolah).					

OPD | KABAG HUKUM

No.	Komponen	Indikator Keberhasilan	0	1	2	3	4
		Sekolah memiliki bahan bacaan dan kegiatan yang mengembangkan literasi digital (penyediaan kelas virtual sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, berkomunikasi antarwarga sekolah menggunakan teknologi digital, seperti pos-el dan media sosial, pengarsipan digital, dan lain- lain).					
		Sekolah memiliki bahan bacaan dan kegiatan yang mengembangkan literasi budaya dan kewargaan (mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kesenian/kebudayaan daerah; mengunjungi museum, tempat wisata, peninggalan sejarah, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor polisi, kantor DPR, dan lain-lain).					
9.	Evaluasi GLS	Sekolah memiliki instrumen dengan indikator yang jelas dan mendokumentasikan secara lengkap untuk mengukur keberhasilan program GLS					
		Kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua melakukan kegiatan pengawasan (*monitoring*) GLS secara rutin dan berkelanjutan.					
		Sekolah memiliki mekanisme umpan balik dari peserta didik dalam pelaksanaan GLS					
		Sekolah menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan GLS.					
		Sekolah melibatkan kepala sekolah, guru, peserta didik, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam pelaksanaan GLS					
		Warga sekolah menggunakan sarana dan prasarana penunjang literasi (perpustakaan sekolah, pojok baca, mading sekolah, taman sekolah, dan alat peraga) secara efektif.					
		Gerakan GLS meningkatkan prestasi akademi					

OPD | KABAG HUKUM

Tabel 5.2.
Penilaian dan Indikator Keberhasilan
Gerakan Literasi Keluarga

GERAKAN LITERASI KELUARGA							
No.	Komponen	Indikator Keberhasilan	0	1	2	3	4
1	Penilaian awal	Keluarga mengidentifikasi sarana dan prasarana yang mendukung literasi keluarga.					
		Keluarga mengidentifikasi anggota keluarga yang mendukung kegiatan literasi.					
		Keluarga mengidentifikasi aktivitas literasi yang dilakukan di rumah.					
2	Aturan dan penganggaran literasi keluarga	Keluarga menyediakan alokasi anggaran untuk literasi secara berkala					
3	Sarana prasara- na pendukung literasi keluarga	Keluarga memiliki sarana dan prasarana yang mendukung literasi keluarga (perpustakaan keluarga, pojok baca, komputer, dan jaringan internet)					
		Keluarga memiliki berbagai macam varian dan bentuk bahan bacaan keluarga (majalah, koran, buku bacaan, dan buku bacaan elektronik)					
4	Partisipasi keluarga dalam pengemban- gan literasi di sekolah	Keluarga berpartisipasi dalam kegiatan literasi di sekolah.					
		Keluarga melakukan penumbuhkembangan literasi di rumah yang disinkronisasi dengan kegiatan literasi di sekolah					
		Keluarga mendokumentasikan praktik baik kegiatan literasi yang dilakukan di rumah untuk dijadikan bahan diskusi di sekolah					
5	Partisipasi keluarga dalam pengemban- gan literasi di masyarakat	Keluarga terlibat dalam kegiatan literasi di masyarakat.					
6	Implementasi enam dimensi literasi	Keluarga memiliki kegiatan atau aktivitas yang mengembangkan literasi baca-tulis (membacakan buku kepada anak sejak dini, memiliki jadwal membaca buku bersama, menulis surat kepada teman atau keluarga, berlangganan berbagai macam bahan bacaan, dan lain-lain).					

OPD | KABAG HUKUM

No.	Komponen	Indikator Keberhasilan	0	1	2	3	4
		Keluarga memiliki kegiatan atau aktivitas yang mengembangkan literasi numerasi (memiliki bahan bacaan tentang numerasi, melibatkan anak dalam transaksi jual beli, seperti membandingkan harga dan menentukan harga terbaik, mengukur pengeluaran air dan listrik keluarga, serta berusaha menghemat, menghitung jarak dan waktu ketika berpergian, dan lain-lain)					
		Keluarga memiliki kegiatan atau aktivitas yang mengembangkan literasi sains (memiliki bahan bacaan tentang sains, memelihara tanaman dan mengamati pertumbuhannya, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, memasak bersama dan mendiskusikan bahan masakan serta perubahan zat makanan, dan lain-lain).					
		Keluarga memiliki kegiatan atau aktivitas yang mengembangkan literasi digital (memiliki bahan bacaan tentang digital, memanfaatkan aplikasi dalam gawai dalam kehidupan sehari-hari, seperti membeli barang, mencari informasi, menontonfilmedukasi, danlain-					
		Keluarga memiliki kegiatan atau aktivitas yang mengembangkan literasi finansial (memperkenalkan aktivitas yang menghasilkan uang kepada anak, mengelola keuangandenganmencatatpemasukandan pengeluaran, mengajak anak untuk menabung di celengan atau di bank, memanfaatkan gawai dalam bertransaksi jual beli, mentransfer uang, dan lain-lain).					
		Keluarga memiliki kegiatan atau aktivitas yang mengembangkan literasi budaya dan kewargaan (memiliki bahan bacaan tentang budaya dan kewargaan, mengunjungi tempat bersejarah dan berbudaya, mengenalkan dan mendiskusikan dokumen penting keluarga, berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, berdiskusi tentang berita/ informasi tentang budaya dan kewargaan, dan lain-lain).					
7	Evaluasi GLK	Keluarga melakukan refleksi terhadap kegiatan literasi yang sudah dilakukan di rumah.					

OPD
KABAG HUKUM

Tabel 5.3.
Penilaian dan Indikator Keberhasilan
Gerakan Literasi Masyarakat

GERAKAN LITERASI MASYARAKAT								
No.	Komponen	Indikator Keberhasilan	0	1	2	3	4
1	Penilaian awal	Pemerintah daerah mengidentifikasi sumber- sumber belajar (koleksi buku bacaan, alat peraga, akses internet, narasumber dari tokoh masyarakat, tokoh agama, DUDI, budayawan, pegiat seni, pegiat literasi, dan lain-lain) dan sarana prasarana (museum, sanggar, perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, kantor pemerintah, perguruan tinggi, lapangan olahraga untuk publik, dan lain-lain) dilingkungannya					
		Pemerintah daerah mengidentifikasi data literasi di lingkungannya (misalnya, tingkat peminjaman buku di perpustakaan daerah, rata-rata nilai UN, program pembiasaan membaca,kebijakanpendukungliterasi,angka buta aksara dan lain-lain).					
		Pemerintah daerah mengidentifikasi sumber-sumber (penggalian dana) untuk mengembangkan literasi (misalnya, sumbangan CSR, bantuan pemerintah,dan lain-lain).					
2	Pelibatan para pemangku kepentingan di daerah dalam GLM	Pemerintah daerah melibatkan para pemangku kepentingan dalam mengembangkan GLM (lembaga pemerintah, nonpemerintah, DUDI, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat)					
		Pemerintah daerah menyosialisasikan GLM dengan menggunakan berbagai cara (media sosial, media elektronik, media cetak, sosialisasi langsung, dan lain-lain) kepada masyarakat.					
		Pemerintah daerah memiliki data komunitas literasi dan taman bacaan masyarakat di daerah secaralengkap.					
3	Desain kebijakan di masyarakat (kota/ kabupaten)	Pemerintah daerah membentuk tim pelaksana GLM.					
		Pemerintah daerah memiliki peraturan daerah mendukung implementasi GLM.					
		Pemerintah daerah memiliki anggaran khusus untuk kegiatan GLM					
		Pemerintah daerah memiliki fasilitas pendukunguntukkegiatanGLM					

OPD | KABAG HUKUM

No.	Komponen	Indikator Keberhasilan	0	1	2	3	4
		Pemerintah daerah melakukan upaya sosialiasasi dan koordinasi untuk mendukung kegiatan GLM.					
4	Desain kegiatan GLM	Pemerintah daerah mengembangkan kegiatan literasi secara seimbang antara enam literasi, yaitu literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan.					
		Pemerintah daerah menggunakan potensi lingkungan (fisik, sosial, dan budaya) untuk memperkaya pengalaman belajar masyarakat.					
		Pemerintah daerah memiliki program unggulan kegiatan literasi untuk masyarakat umum					
5	Pengembangan fasilitas literasi di ruang publik	Pemerintah daerah memiliki pojok baca atau perpustakaan pada semua instansi/lembaga pemerintah di daerah.					
		Pemerintah daerah memiliki fasilitas pendukung literasi di ruang publik (pojok baca di alun-alun, halte, terminal, bandara, pelabuhan, angkot, dan taman)					
		Pemerintah daerah melibatkan DUDI untuk membangun dan mengembangkan fasilitas publik dalam menunjang budaya literasi di daerah.					
6	Pengembangan SDM literasi	Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan literasi secara mandiri.					
		Pemerintah daerah melakukan berbagai inovasi dalam memberdayakan pegiat literasi.					
		Pemerintah daerah mengadakan kegiatan yang berkesinambungan untuk mendukung pengembangan kapasitas fasilitator literasi.					
7	Implementasi enam dimensi literasi	Pemerintah daerah memiliki bahan bacaan dan kegiatan yang mengembangkan literasi baca-tulis (mendongeng di taman kota, mengadakan festival literasi, membentuk kampung literasi, menyediakan pojok baca di tempat umum, seperti halte bus, kereta api, ruang tunggu bandara, dan kantor-kantor pelayanan masyarakat, dan lain-lain)					
		Pemerintah daerah memiliki bahan bacaan dan kegiatan yang mengembangkan literasi numerasi (mengumpulkan data dan informasi tentang warga desa, membuat batas-batas wilayah rumah dan tanah, menghitung jumlah sampah yang dihasilkan sebuah desa, mengelola pemasukan dan penyaluran zakat, dan lain-lain).					
		Pemerintah daerah memiliki bahan bacaan dan kegiatan yang mengembangkan literasi digital (media sosial untuk peningkatan usaha dan kewirausahaan, penggalangan dana sosial, menggunakan petisi daring untuk kontrol sosial, mencari pekerjaan, dan lain-lain)					



No.	Komponen	Indikator Keberhasilan	0	1	2	3	4
		Pemerintah daerah memiliki kegiatan atau aktivitas yang mengembangkan literasi finansial (edukasi tentang produk dan jasa keuangan kepada masyarakat, menyelenggarakan program arisan di tingkat RT/RW, penyuluhan investasi yang aman kepada seluruh lapisan masyarakat, penyuluhan bahaya meminjam uang di rentenir, pelibatan anggota masyarakat dalam merencanakan kegiatan finansial yang relevan dengan kegiatan dan kebutuhan mereka sehari-hari, dan lain-lain).					
		Pemerintah daerah memiliki bahan bacaan dan kegiatan yang mengembangkan literasi budaya dan kewargaan (mengembangkan taman baca masyarakat, menambah ragam dan varian buku bacaan yang berkaitan dengan literasi budaya dan kewargaan, melakukan kunjungan ke tempat-tempat dengan nilai budaya dan sejarah yang dilakukan bersama-sama, menyelenggarakan dan mengikuti pelatihan terkait literasi budaya dan kewargaan, dan lain-lain).					
8	Evaluasi GLM	Pemerintah daerah melakukan pengembangan literasi (penguatan SDM, perluasan fasilitas/ akses penunjang, penyediaan bahan bacaan, pelibatan publik, dan penguatan tatakelola) di daerah.					
		Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan mitra lembaga/komunitas melakukan kegiatan pengawasan GLM secara rutin dan berkelanjutan					
		Pemerintah daerah menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan GLN.					
		Pemerintah daerah memanfaatkan berbagai media (papan informasi manual/digital, laman, buletin, poster, radio, televisi, dan lain- lain) untuk meningkatkan budaya literasi.					
		Gerakan Literasi Masyarakat meningkatkan indeks pembangunan manusia, angka partisipasi murni, dan nilai rata-rata UN di daerah, dan lain-lain.					

OPD | KABAG HUKUM

BAB 6

PENUTUP

Dokumen Peta Jalan Kabupaten Literasi tahun 2019-2020 ini merupakan bentuk operasionalisasi *grand design* Kabupaten Literasi yang disusun bersama antara pemerintah dan pegiat literasi yang ada dan merupakan rencana rinci pelaksanaan kabupaten literasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya. Dokumen peta jalan ini secara subtansial telah memuat strategi, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan kegiatan. Kebijakan dan rincian kegiatan yang ada dalam dokumen peta jalan ini merupakan kegiatan prioritas dan strategis serta bersinergi dengan dokumen perencanaan daerah lainnya yaitu RPJMD dan renstra. Sehubungan dengan dokumen peta jalan ini, maka instansi yang berwenang membidangi tugas pokok dan fungsi terkait dengan lingkup literasi yang ada di Kabupaten Lampung Barat, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Peta jalan kabupaten literasi Kabupaten Lampung Barat tahun 2019-2022 ini merupakan pedoman bagi instansi yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun perencanaan kegiatan dengan frame yang sama yaitu 2019-2022, dengan demikian sinergitas dan simultan arah pelaksanaan kabupaten literasi selama 3 (tiga) tahun ke depan;

OPD | KABAG HUKUM

2. Peta jalan kabupaten literasi Kabupaten Lampung Barat tahun 2019-2022 ini menjadi dasar atau acuan bagi instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun dokumen perencanaan daerah;
3. Peta jalan kabupaten literasi Kabupaten Lampung Barat tahun 2019-2022 menjadi dasar penyelenggaraan kabupaten literasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan menjadi dasar bagi DPRD Kabupaten Lampung Barat dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kabupaten literasi di Kabupaten Lampung Barat;
4. Peta jalan kabupaten literasi Kabupaten Lampung Barat tahun 2019-2022 dapat diperbaharui dalam rangka menyesuaikan perubahan-perubahan atau kebijakan-kebijakan factual terkait kebijakan literasi baik dari tingkat pusat, kabupaten maupun OPD dan lintas sector terkait lainnya;

Dalam rangka menjaga konsistensi, sinergitas dan keberlangsungan pelaksanaan dan keberhasilan kabupaten literasi di Kabupaten Lampung Barat, maka diperlukan monitoring dan pelaporan implementasi Peta Jalan Kabupaten Literasi secara reguler dan periodik. Untuk itu masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pelaksanaan kabupaten literasi agar melakukan pengawasan internal serta bertanggung jawab atas kinerja sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kabupaten literasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai pemegang amanah rakyat dalam melakukan tugas pembangunan yang salah satunya adalah pembangunan sumber daya manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa harus menjadi sebuah organisasi yang professional dan mumpuni dalam mewujudkan kabupaten literasi, namun melalui prinsip-prinsip berkesinambungan, terintegrasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan hal itu

OPD | KASAG HUKUM

akan terwujud. Kata kuncinya adalah motivasi yang kuat dari seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat baik dari level bupati dan jajarannya sampai pada level masyarakat harus bersatu padu dan saling berpartisipasi aktif sehingga dapat menjaga keberadaan keluaran (*output*), nilai tambah (*value added*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*benefit*) dari pelaksanaan kabupaten literasi di Kabupaten Lampung Barat "Literasi untuk Kesejahteraan".

Salam Literasi....



OPD | KABAG HUKUM



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Teratai No.03 Komplek Perkantoran Pemda Lampung Barat, Liwa 34811

Telp/Fax. (0728) 21285 e-mail : balitbang.lambar@gmail.com

OPD | KA HUKUM

DAFTAR PUSTAKA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat 2017-2022, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018;

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat 2017, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat 2017;

Peta Jalan Gerakan Literasi Nasional, Badan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017;

Peta Jalan Gerakan Literasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017;

Pedoman Penilaian dan Evaluasi Gerakan Literasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017;

OPD | KABAG HUKUM

Literasi Untuk
Kesejahteraan Rakyat

